



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



Sumber: Dokumentasi PDPM Tahun 2021

PENYUSUNAN INDEKS GINI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
PDPM - DKPU ITS SURABAYA
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Dokumen Evaluasi Indeks Gini Tahun 2022 Kota Mojokerto, telah terselesaikan dengan baik.

Indeks Gini merupakan salah satu indikator kinerja daerah (IKD) yang tertuang pada RPJMD Kota Mojokerto untuk menggambarkan tingkat kesenjangan (ketidakmerataan) pembagian pendapatan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kota Mojokerto. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kajian dan evaluasi Indeks Gini dari tahun ke tahun sebagai evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun sebelumnya dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Laporan ini berisikan gambaran mengenai kondisi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Mojokerto di Tahun 2021. Di samping itu dibahas juga karakteristik ketimpangan masyarakat menurut pendidikan, lapangan usaha, dan menurut kecamatan di Kota Mojokerto. Pembahasan terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat kesejahteraan dan ketimpangan juga ditambahkan pada laporan ini. Pada bagian akhir dibahas arahan strategi dalam upaya meminimalkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Mojokerto.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi para pengambil keputusan, pebisnis, peneliti, atau masyarakat umum untuk berbagai kepentingan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari masih ada kekurangan sempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu saran perbaikan kami sangat mengharapkan dan tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto, Juni 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto



SANTI RATNANING TIAS. ST. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19791111 200212 2 005

Halaman | 2

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Lingkup Pekerjaan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan	5
2.2 Konsumsi Rumah Tangga	6
2.3 Kurva Lorenz	8
2.4 Indeks Gini	9
2.5 Kriteria Ketimpangan Menurut Bank Dunia	11
2.6 Pandemi Covid-19 Berdampak pada Pendapatan	12
BAB III METODOLOGI	14
3.1 Pengumpulan Data	14
3.2 Distribusi Sampling Pengumpulan Data Primer	16
3.3 Analisis Data	17
3.4 Konsep dan Definisi	18
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA MOJOKERTO	20
4.1. Jumlah dan Struktur Penduduk	20
4.2. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi	25
4.3. Kondisi Tempat Tinggal dan Rumah Tangga di Kota Mojokerto	26
BAB V KONDISI INDEKS GINI KOTA MOJOKERTO	31
5.1. Gambaran Umum Indeks Gini Kota Mojokerto	31
5.2. Pola Konsumsi Rumah Tangga	41
5.3. Ketimpangan Menurut 54	
5.4. Kurva Lorenz	52
5.5. Kriteria Bank Dunia	53



5.6.	Program dan Strategi Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Mojokerto	55
5.6.1.	Strategi	56
5.6.2.	Arah Kebijakan	56
5.6.3.	Program	56
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		58
6.1.	Kesimpulan	58
6.2.	Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		62



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Data Yang Digunakan pada Publikasi Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2021	16
Tabel 3.2.	Persebaran Jumlah Sampel Tambahan	17
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk, Angka Pertambahan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021	20
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 4.3.	Komposisi Penduduk (persen) dan Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur, Tahun 2019 – 2021	23
Tabel 4.4.	Indikator Ketenagakerjaan Kota Mojokerto, Tahun 2019 – 2021	24
Tabel 5.1.	Indeks Gini Kota Mojokerto 2016 – 2021	46
Tabel 5.2.	Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2021	47
Tabel 5.3.	Indeks Gini Menurut Pengeluaran di Kota Mojokerto 2019 – 2021	49
Tabel 5.4.	Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2021	49
Tabel 5.5.	Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2019 – 2021	50
Tabel 5.6.	Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021	51
Tabel 5.7.	Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019 – 2021	52
Tabel 5.8.	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Mojokerto 2019-2021	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Diagram Alir Pekerjaan	14
Gambar 3. 2	Wawancara Surveyor Kepada Masyarakat Kota Mojokerto	15
Gambar 4. 1	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kota Mojokerto	21
Gambar 4.2	Piramida Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	22
Gambar 4. 3	Wilayah Administrasi Kota Mojokerto	25
Gambar 4. 4	Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati	26
Gambar 4. 5	Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Kualitas Bangunan Rumah	27
Gambar 4. 6	Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	28
Gambar 4. 7	Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja	29
Gambar 4. 8	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum (2019-2021)	30
Gambar 4. 9	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Mandi/Cuci/Masak, 2019-2021	30
Gambar 5. 1	Persebaran Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021	32
Gambar 5. 2	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.	33
Gambar 5. 3	Indeks Gini Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia tahun 2016-2021	34
Gambar 5. 4	Indeks Gini dan PDRB Per Kapita Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia tahun 2016-2021	36
Gambar 5. 5	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2019-2021	38
Gambar 5. 6	Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini di Kota Mojokerto Tahun 2016-2021	39
Gambar 5. 7	Penyerapan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2019-2021 Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah)	41



Gambar 5. 8	Penyerapan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020-2021	42
Gambar 5. 9	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016-2021	43
Gambar 5. 10	Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016-2021	44
Gambar 5. 11	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pendapatan Tahun 2019-2021.	45
Gambar 5. 12	Pen's Parade Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Mojokerto menurut jenis Pengeluaran Tahun 2021	46
Gambar 5. 13	Distribusi Pengeluaran Kota Mojokerto Tahun 2021	47
Gambar 5. 14	Peta Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2021	49
Gambar 5. 15	Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2021	54

B I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama setiap negara maupun daerah (wilayah) melakukan pembangunan ekonomi adalah untuk memperoleh kemakmuran, baik kemakmuran bagi daerahnya maupun kemakmuran bagi penduduknya. Kemakmuran hanya dapat dicapai apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu daerah berhasil. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi faktor non-ekonomi.



Secara kuantitatif tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah : (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Indeks Gini, (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan per kapita, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (5) *Physical Quality life Index* (PQLI) atau indeks mutu hidup.

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek dalam rangka mencapai kesejahteraan. Adanya perubahan tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya kesempatan kerja. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, dimana tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara makro akan meningkatkan kekokohan struktur perekonomian daerah.

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada kenyataannya masih belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Permasalahan yang sering dihadapi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah tidak meratanya distribusi pendapatan atau terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat yang kaya dengan kelompok masyarakat yang miskin. Ketimpangan pendapatan antar golongan (kaya dan miskin) yang tinggi tentunya mendorong kecemburuan yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang dapat mengganggu pembangunan secara keseluruhan dalam berbagai aspeknya.

Pada tataran pembangunan daerah, informasi terkait distribusi pendapatan memang boleh dikatakan masih relatif minim. Padahal, pasca diratifikasinya Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang No 23 Tahun 2014, daerah Kota/kota memiliki wewenang penuh untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Kurangnya informasi dan bahasan terkait distribusi pendapatan, tentu mempengaruhi rencana kerja yang akan diterapkan. Dikhawatirkan, kebijakan yang diambil cenderung hanya tertuju pada capaian pertumbuhan ekonomi, dan bukan bagaimana mewujudkan pemerataan. Oleh karena itu, Publikasi Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2022 menjadi penting dan akan bermanfaat sebagai salah satu rujukan arah kebijakan.

Untuk mengkaji hal tersebut perlu dilakukan sebuah pengukuran dengan melihat indikator-indikator Indeks Gini Kota Mojokerto yang menggambarkan kondisi secara umum permasalahan distribusi pendapatan. Alat atau indikator untuk mengukur tingkat



ketimpangan distribusi pendapatan yang umum digunakan adalah Indeks Gini dan ukuran ketimpangan yang digunakan oleh Bank Dunia. Kurangnya informasi dan bahasan terkait Indeks Gini, tentu mempengaruhi rencana kerja yang akan diterapkan. Dikhawatirkan, kebijakan yang diambil cenderung hanya tertuju pada capaian pertumbuhan ekonomi dan bukan bagaimana mewujudkan pemerataan. Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan PKPDPM – DKPU ITS melakukan kegiatan Penyusunan Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2022.

Laporan ini berisikan capaian indeks gini Kota Mojokerto Tahun 2021 menurut wilayah, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Secara lengkap dijabarkan pada analisa dan pembahasan serta rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pembangunan Pemerintahan Kota Mojokerto.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Dalam mengetahui dan menggambarkan tingkat kesenjangan perlu diketahui tingkat kesenjangan distribusi pendapatan melalui indeks gini (Gini Ratio) serta mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia sehingga diharapkan:

- a. Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat
- b. Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita
- c. Memberi gambaran kemajuan wilayah
- d. Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk

1.3 Lingkup Pekerjaan

1.3.1 Wilayah studi:

Wilayah kajian pada studi ini adalah Kota Mojokerto.

1.3.2 Kegiatan yang dilakukan:

1. Melakukan pengumpulan data Indeks Gini Kota Mojokerto 2021 sesuai yang tertuang dalam RPJMD bersumber dari OPD atau instansi lainnya dengan mengukur menggunakan formula penghitungan Indeks Gini.



2. Metode Analisis yang digunakan dalam Penyusunan Indeks Gini metode analisis diskriptif yang merupakan analisis kuantitatif untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik yang divisualisasikan sehingga dapat menggambarkan dari obyek penelitian lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna.
3. Dalam menginterpretasikan angka Indeks Gini dapat dibandingkan dengan angka Indeks Gini Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.
4. Dalam melaksanakan survei untuk pengisian kusioner agar untuk OPD dan Instansi lainnya yang berada di Kota Mojokerto jelas / mudah dipahami untuk data masukan bagi seksi Pengelolaan Data dan Statistik.
5. Data mentah yang diolah dalam Penyusunan Indeks Gini adalah data tahun 2021.
6. Data harus valid sesuai kondisi dilapangan karena untuk Perencanaan dan Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022.
7. Data analisis dari survei yang terbaru (*up date*) ataupun survei BPS sebagai rujukan dan data hasil dari survei.
8. Analisis yang tajam yang akan dipergunakan sebagai masukan bagi kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto.
9. Hasil kegiatan diunggah ke Website <https://satikomo.mojokertokota.go.id>.
10. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau tugas kepada Walikota Mojokerto.

1.4 Luaran

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2022 yang meliputi:

- a) **Bab I Pendahuluan:** berisi mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, dasar dan ruang lingkup penelitian serta Sistematika Penyajian Laporan Akhir.
- b) **Bab II Tinjauan Pustaka:** berisi distribusi pendapatan dan ketimpangan, kurva Lorenz, dan kriteria bank dunia.
- c) **Bab III Metodologi:** berisi mengenai istilah umum, data dan sumber data, konsep dan definisi, serta tahapan analisis dalam kegiatan Penyusunan Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2022.



- d) **Bab IV Hasil dan Pembahasan terkait Kondisi Indeks Gini Kota Mojokerto:** berisi mengenai analisis Indeks Gini untuk mengetahui posisi dan dinamika Indeks Gini Kota Mojokerto, Indeks Gini dari Komponen pengeluaran, pola konsumsi kelompok masyarakat Kota Mojokerto, serta untuk melihat ketimpangan pendapatan Kota Mojokerto dari perspektif lain.
- e) **Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.**
Berisi kesimpulan pembahasan analisis dan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Mojokerto.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan

Distribusi pendapatan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat proporsi pendapatan yang diterima masyarakat. Terdapat dua gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya (Ahluwalia dalam Sadono, 2006). Bertolak dari hal tersebut, dapat diperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Ketimpangan atau kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Menurut Hindriks dan Myles (Hindriks, 2006) dalam melakukan analisa kesenjangan diperlukan suatu ukuran yang dapat menangkap pola distribusi pendapatan, kemudian menghasilkan angka yang dapat diinterpretasikan dan diperbandingkan, baik antar waktu maupun antar *sub-sample* dan *sample*, selain juga mampu menunjukkan derajat kesenjangan. Masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

1. Distribusi pendapatan antar golongan pendapatan atau kesenjangan relatif.
2. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak ahli yang menyatakan bahwa pola pembangunan Indonesia berorientasi ke daerah perkotaan.
3. Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar kabupaten/kota. Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.

Menurut Oshima dalam Putri ada tiga faktor yang menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan di daerah perkotaan dan pedesaan, yaitu:

1. Faktor pendapatan, terutama di daerah pedesaan umumnya memiliki pendapatan rata-rata per kapita yang lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan.
2. Penduduk desa lebih banyak bermata pencaharian di sektor pertanian dibandingkan penduduk kota bukan pertanian.



3. Distribusi pendapatan yang lebih tinggi di daerah kota.

Pada saat membahas kesenjangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Fenomena ini menimbulkan konsep "garis kemiskinan" (*poverty line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada di garis kemiskinan (*absolute poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital insentive*), sehingga presentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.2 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran total untuk membeli barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah



tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga di bagi menjadi dua macam yaitu konsumsi makanan dan non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk non makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun non makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi 3 yaitu ialah:

1. Faktor Ekonomi

Empat faktor yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu:

a. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi juga makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif.

b. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*) merupakan kekayaan rumah tangga riil (rumah, tanah, dan mobil) dan finansial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan *disposable*.

c. Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*opportunity cost*) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

d. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About The Future*)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyaknya anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestik dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.



2. Faktor Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar juga akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Pengeluaran konsumsi suatu daerah atau negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.

b. Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain:

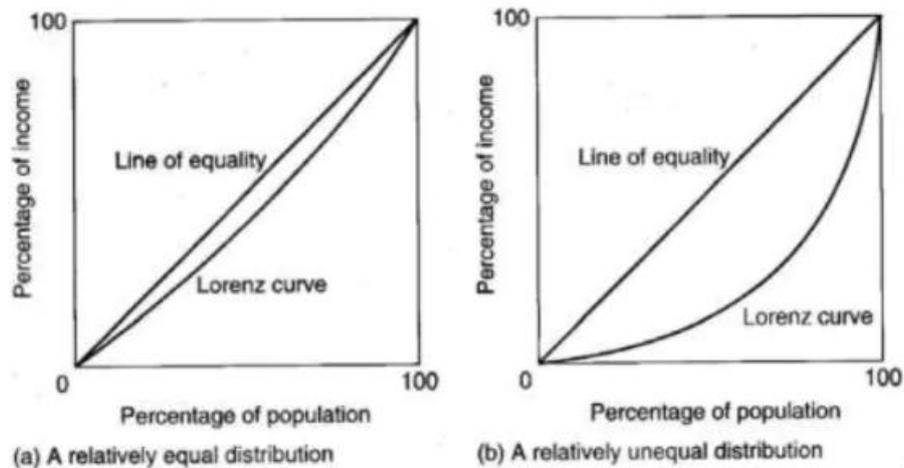
- a) Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- b) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- c) Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

3. Faktor-faktor Non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat/ideal.

2.3 Kurva Lorenz

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan ketidakmerataan pendapatan pada masyarakat di suatu daerah adalah Kurva Lorenz. Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz pada tahun 1905, seorang ahli statistik Amerika yang menemukan diagram untuk menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan menurut kelompok penduduk yang juga dihitung secara kumulatif. Kurva Lorenz adalah kurva melengkung yang menyentuh titik A, B, C, dan D dalam sebuah bujursangkar dimana sumbu vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sumbu horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan. Garis diagonal menunjukkan garis pemerataan yang sempurna.



Gambar 2.1. Ilustrasi Kurva Lorenz

Sumber: https://www.slideshare.net/mishelei_loen/distribusi-pendapatan

Tingkat ketimpangan dapat ditentukan berdasarkan Kurva Lorenz dengan melihat jarak kurva ke garis diagonal. Semakin dekat jarak kurva terhadap garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin kecil atau dengan kata lain distribusi pendapatan semakin merata, hal ini ditunjukkan oleh gambar (a). Sebaliknya, kurva yang menjauhi garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan penduduk semakin timpang seperti yang ditunjukkan oleh gambar (b). Pembuatan Kurva Lorenz dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan desil pertama hingga kesepuluh pada distribusi data pengeluaran.
3. Menghitung besarnya nilai pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
5. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dari masing-masing desil.
6. Memetakan dalam plot dua dimensi antara masing-masing desil pada sisi horizontal dengan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

2.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang sering digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk. Dasar perhitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran.



Sebagai ilustrasi, luas Kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Indeks Gini. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. Secara matematis, untuk menghitung Indeks Gini dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Gini\ Ratio = 1 - \sum_{i=1}^K \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan:

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke- i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke- i

K = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Angka Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna), sedangkan nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan pola pengeluaran suatu masyarakat dibagi menjadi tiga tingkatan. Nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Tahapan proses pengolahan data Susenas untuk penghitungan Indeks Gini adalah sebagai berikut :

1. Membuat kelas pengeluaran penduduk berdasarkan data Susenas.
2. Menghitung jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran
3. Menghitung proporsi jumlah penduduk.
4. Menghitung jumlah pendapatan penduduk pada masing-masing kelompok pengeluaran.
5. Menentukan proporsi jumlah pendapatan hingga kelas ke- i .
6. Menghitung kumulatif proporsi pendapatan
7. Menambahkan kumulatif proporsi pendapatan pada kelompok pengeluaran ke- i dengan kelompok pengeluaran ke- $(i-1)$.
8. Mengalikan proporsi jumlah penduduk pada poin 3 dengan hasil penambahan



kumulatif proporsi pendapatan pada poin 7.

9. Menjumlahkan seluruh nilai pada poin 8.
10. Nilai Indeks Gini diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan nilai perhitungan pada poin 9.

Penggunaan Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan Indeks Gini masih memiliki kelemahan, yaitu letak ketimpangan tidak dapat diketahui hanya berdasarkan nilai Indeks Gini. Oleh karena itu selain digunakan indikator Indeks Gini, biasanya juga digunakan ukuran ketimpangan menurut Kriteria Bank Dunia untuk melengkapi kelemahan tersebut.

2.5 Kriteria Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Ukuran kesenjangan pendapatan kriteria Bank Dunia merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tingkat ketimpangan rendah jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
2. Tingkat ketimpangan moderat jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan.
3. Tingkat ketimpangan tinggi jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12 persen jumlah pendapatan.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah (40 persen penduduk berpenghasilan menengah) dan atas (20 persen penduduk berpenghasilan tertinggi) tidaklah diperhatikan. Seandainya terjadi perubahan penerimaan pendapatan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan atas, tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia ini.

Proses pengolahan data Susenas untuk penghitungan ukuran ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia sebagai berikut:

1. Mengurutkan data pengeluaran dari terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan nilai desil ke-4 dan ke-8 pada distribusi data pengeluaran.
3. Nilai pengeluaran yang kurang dari desil ke-4 dikelompokkan sebagai penduduk berpendapatan terendah, nilai antara desil ke-4 hingga 8 masuk pada kelompok sedang



- dan nilai pengeluaran di atas desil ke 8 masuk dalam kategori berpendapatan tertinggi.
4. Menghitung jumlah penduduk dan nilai pengeluaran pada masing-masing kelompok sebagaimana kriteria pada poin 3.
 5. Menghitung persentase pendapatan pada masing-masing kelompok,
 6. Menentukan tingkat ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang difokuskan pada kelompok 40 % penduduk berpendapatan terendah.

2.6 Pandemi Covid-19 Berdampak pada Pendapatan

Covid-19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia dan hewan. Virus ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Terjadinya pandemi Covid 19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi virus corona 2019 yang tersebar di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan pandemi ini berdasarkan pada sebaran terjadinya kasus Covid-19 sebanyak 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara.

Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada kehidupan ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi secara global terlihat pada kegiatan ekspor dan impor, karena banyak Negara terutama yang terjangkit Covid-19 mulai menghentikan barang-barang yang akan masuk maupun keluar dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus. Menurut World Bank (2020) perekonomian global mengalami dampak yang parah selama kuartal kedua karena adanya mobilitas yang terbatas serta kebijakan kesehatan publik yang diberlakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Di Indonesia Covid-19 pertama kali dilaporkan pada awal Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga pemerintah Presiden Joko Widodo membentuk sebuah komite dalam rangka penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 23 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada akhir tahun 2020, WHO mengungkapkan dalam laporan situasi Covid-19 bahwa persentase kematian corona di Indonesia masih tinggi, hal ini membuat pemerintah terus berupaya menyarankan kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak, mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya serta menjauhi kerumunan yang bisa

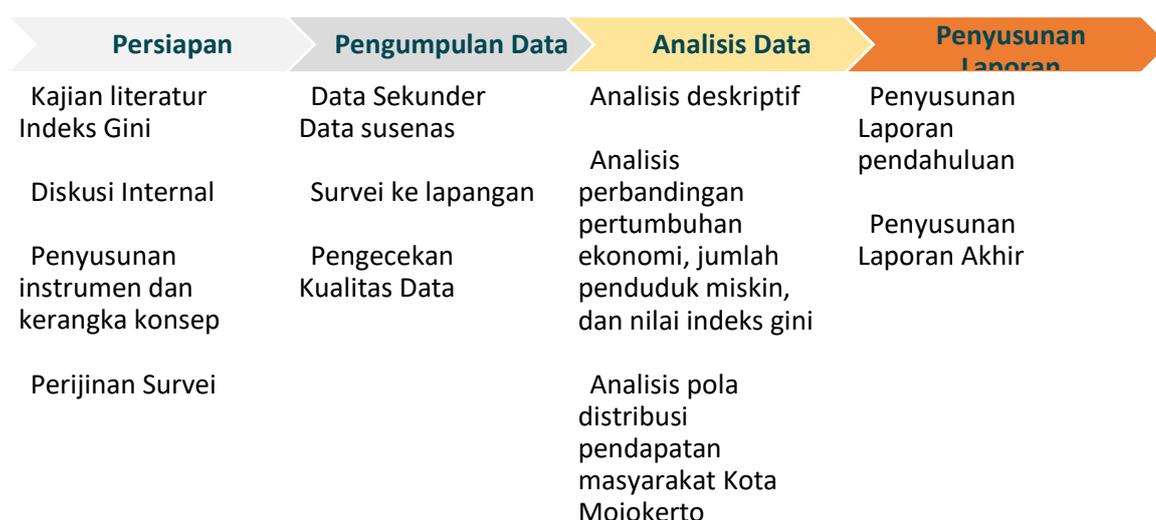


membawa risiko penyebaran Covid-19. Presiden juga menyerukan kepada penduduk Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pembatasan sosial (*social distancing*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengeluarkan beberapa kebijakan untuk belajar, beribadah dan bekerja dirumah (*work from home*).



BAB III METODOLOGI

Secara umum, terdapat 4 (empat) tahapan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu: persiapan, pengumpulan data, pengolahan data & analisis data, dan penyusunan laporan, seperti disajikan pada Gambar 3.1. Tahap persiapan, meliputi: kajian literatur terkait penyusunan komponen indeks gini dan gambaran capaian pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam pelayanan publik.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Pekerjaan

3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data primer diperoleh melalui pendataan rumah tangga yang terkait dengan pengeluaran per kapitanya.

Pengumpulan data harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Data primer didapatkan dengan melakukan survei/ wawancara langsung kepada responden dengan kuesioner seperti pada Lampiran 1. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 120 orang yang tersebar di tiga kecamatan Kota Mojokerto. Survei dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 30 Mei 2022 Pada Gambar 3.2 tersaji beberapa dokumentasi saat survei lapangan.



Gambar 3. 2 Wawancara Surveyor Kepada Masyarakat Kota Mojokerto

Sumber: Survei PDPM DKPU Tahun 2022

- b. Data sekunder yang dikumpulkan sebagai bahan analisis merupakan data terbaru dan diakui kredibilitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sumber data berasal dari BPS). Data yang digunakan untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi *Indeks Gini* Kota Mojokerto Tahun 2022, seperti disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1. Data Yang Digunakan pada Publikasi Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Data (Variabel)	Sumber Data
1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kota Mojokerto tahun 2021	BPS Kota Mojokerto
2	Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kota Mojokerto tahun 2021	BPS Kota Mojokerto
3	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga di Kota Mojokerto berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja tahun 2021 	Data SUSENAS (row data)-BPS Jakarta
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga di Kota Mojokerto berdasarkan sumber air minum tahun 2021 	BPS Provinsi Jawa Timur
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga di Kota Mojokerto berdasarkan sumber air mandi tahun 2021 	
4	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Jawa Timur 	Data SUSENAS (row data)-BPS Jakarta
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran tahun 2021 	BPS Provinsi Jawa Timur
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini secara umum Kota Mojokerto 	BPS Kota Mojokerto
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini menurut makanan dan bukan makanan 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini menurut jenis kelamin 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini menurut tingkat Pendidikan 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini menurut lapangan usaha utama 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini menurut status pekerjaan utama 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini menurut kecamatan 	
<ul style="list-style-type: none"> Distribusi pendapatan penduduk menurut kriteria bank dunia 		
5	PDRB menurut lapangan usaha Kota Mojokerto	BPS Kota Mojokerto
	Penyerapan tenaga kerja Kota Mojokerto menurut lapangan pekerjaan utama	BPS Provinsi Jawa Timur
6	Data pengeluaran rumah tangga makanan dan non makanan	Survei



3.2 Distribusi Sampling Pengumpulan Data Primer

Sampel yang digunakan diperoleh dari sampel Susenas Maret 2021 dan sampel tambahan dari hasil survei ke rumah tangga. Jumlah sampel susenas yang digunakan sebanyak 510 rumah tangga. Jumlah sampel tambahan sebanyak 120, dimana tersebar di tiga kecamatan seperti pada Tabel 3.2. Survei kepada rumah tangga dilakukan dengan menggunakan kuesioner seperti pada Lampiran.

Tabel 3.2. Persebaran Jumlah Sampel Tambahan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Sampel Rumah Tangga
Prajurit Kulon	Surodinawan	2852	8
	Prajurit Kulon	2667	7
	Blooto	2344	6
	Mentikan	2228	5
	Kauman	1076	3
	Pulorejo	2788	7
	Jumlah Per Kecamatan		13955
Magersari	Gunung Gedangan	2610	7
	Kedundung	5177	14
	Balongsari	2711	7
	Gedongan	820	2
	Magersari	1953	5
	Wates	6709	17
	Jumlah Per Kecamatan		19980
Kranggan	Kranggan	4454	10
	Meri	2930	8
	Jagalan	1005	3
	Miji	2896	7
	Sentanan	770	2
	Purwotengah	565	2
	Jumlah Per Kecamatan		12620
Sampel Total			120

Sumber: <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/statistik>

3.3 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam Penyusunan Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2022 meliputi:



- 1) Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi data secara umum dan dapat disajikan dalam bentuk grafik dan diagram pencar.
- 2) Analisis perbandingan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan nilai Indeks Gini Kota Mojokerto beserta kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
- 3) Analisis Indeks Gini meliputi kelompok pengeluaran makanan dan bukan makanan serta menurut beberapa karakteristik sosial ekonomi maupun menurut kecamatan di Kota Mojokerto.
- 4) Analisis pola distribusi pendapatan masyarakat Kota Mojokerto menggunakan Kurva Lorenz. Selain itu dalam menentukan ukuran pembanding dapat menggunakan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, terutama untuk memperoleh kejelasan bagaimana kondisi ketimpangan tersebut terjadi.

3.4 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang berkaitan dengan publikasi ini antara lain:

- 1) Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/ sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur dalam arti kebutuhan sehari-hari diurus bersama dan jadi satu.
- 2) Anggota rumah tangga (ART) penduduk adalah seorang yang biasanya tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di dalam rumah waktu pendataan maupun sementara tidak ada. Yang bepergian walaupun kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/ akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai ART. Seseorang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau yang telah tinggal di dalam rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap dimasukkan sebagai ART.
- 3) Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Akan tetapi, penggalian informasi pendapatan tidak semudah yang dibayangkan. Responden cenderung memberikan informasi yang tidak sebenarnya, sehingga menyebabkan data bias. Oleh karena itu, data pendapatan didekati menggunakan data pengeluaran. Asumsinya, tingkat pengeluaran penduduk sama dengan pendapatan yang diterima.
- 4) Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Konsumsi rumah tangga sendiri dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan bukan/ non makanan seperti perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang



tahan lama, pajak dan asuransi serta keperluan untuk pesta dan upacara. Konsumsi yang dimaksud tanpa memperhatikan asal barang (membeli, hasil sendiri atau pemberian) serta terbatas pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga saja tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk usaha.

- 5) Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rata-rata per kepala atau per ART.
- 6) PDRB dan angka turunannya disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada saat PDRB tersebut dihitung (dapat dipengaruhi oleh inflasi). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya PDRB pada waktu tertentu atau disebut juga untuk mengetahui level PDRB dan melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan artinya menilai besarnya PDRB menurut harga pada suatu tahun dasar yang ditetapkan. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang biasanya diperoleh dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun dengan tahun yang lain. Saat ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.



BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA MOJOKERTO

4.1. Jumlah dan Struktur Penduduk

Penduduk Indonesia diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi bertujuan menetap. Dalam konteks pembangunan, penduduk memiliki posisi ganda yaitu berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Jumlah penduduk Kota Mojokerto per kecamatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk kondisi Juni 2021 disajikan pada Tabel 4.1. Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penduduk Kota Mojokerto berjumlah 140.747 jiwa, dengan luas wilayah 20,2 km², maka kepadatan penduduk Kota Mojokerto adalah sebesar 6.967,7 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Prajurit Kulon yakni 5.859,5 jiwa/km², sedangkan kepadatan tertinggi di Kecamatan Kranggan sebesar 8.151,1 jiwa/km².

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk, Angka Pertambahan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Pertambahan Penduduk Tahun 2020-2021 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Prajurit Kulon	42.657	195	5.859,5
Magersari	60.187	116	7.277,8
Kranggan	37.903	33	8.151,1
Kota Mojokerto	140.747	344	6.967,7

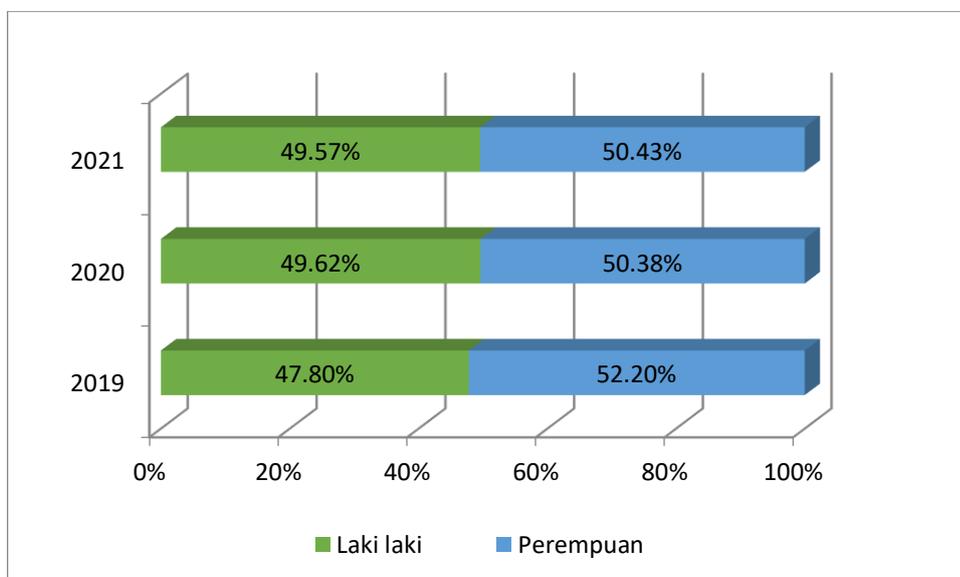
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Mojokerto masih terus meningkat. Pertambahan jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2021 sebesar 344 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,99 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kurun waktu 10 tahun yang lalu (2010-2020), maka pertambahan penduduk pada tahun 2021 mengalami pelambatan. Pertambahan penduduk Kota Mojokerto pada kurun waktu 2010-2020 yaitu sebesar 12.238 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,02 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto hampir setara jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan secara nasional yang sebesar 0,98 persen per tahun dan secara provinsi yang sekitar 0,79, sehingga angka pertumbuhan Kota Mojokerto berada diantara keduanya. Kecamatan Prajurit Kulon



merupakan kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kondisi ini diprediksi akan tetap berlangsung mengingat kepadatan penduduk di kecamatan tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Bila dilihat dari aspek gender, dari total penduduk sebanyak 140.544 jiwa, 69.674 jiwa diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 70.870 jiwa sisanya adalah penduduk perempuan (Gambar 4.1). Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut dengan *sex ratio*, biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.



Gambar 4. 1 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kota Mojokerto

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, 2021(diolah)

Dari proporsi jenis kelamin, *sex ratio* Kota Mojokerto tahun 2021 tercatat sebesar 98,37 (Tabel 4.2). Hal ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Pemerintah Kota Mojokerto hendaknya memperhatikan kondisi tersebut dalam upaya perencanaan penyiapan kesempatan kerja, baik regulasi maupun jenis dan tempat bekerja para angkatan kerja khususnya penduduk perempuan.

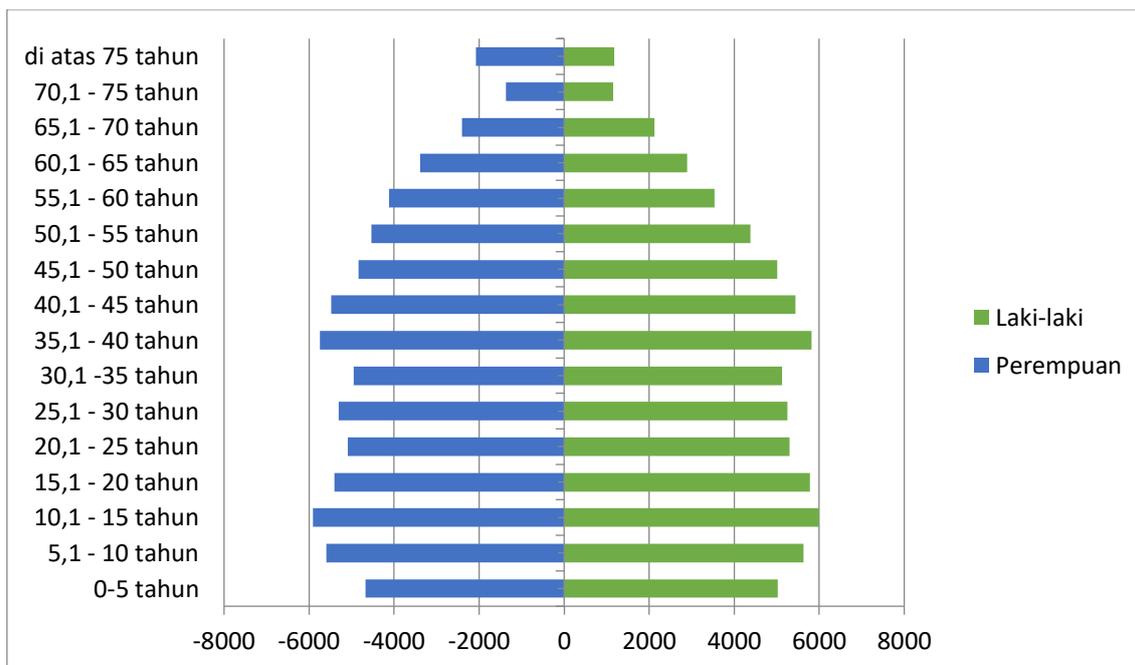


Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Penduduk		Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan	
2019	69.109	70.314	98,29
2020	69.500	70.575	98,48
2021	69.674	70.870	98,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka struktur umur penduduk Kota Mojokerto adalah struktur umur muda yang berarti jumlah penduduk umur muda yang terdiri dari umur remaja hingga produktif lebih dominan. Jumlah penduduk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 97.403 jiwa dengan proporsi sebanyak 68,75 persen, sedangkan penduduk tidak lagi produktif (di atas 64+) berjumlah 11.443 jiwa atau 8,1 persen. Sisanya, sebanyak 32.827 jiwa (23,36 persen) adalah belum produktif usia 0–14 tahun. Dengan memperhatikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui pula angka ketergantungan. Gambar 4.2 berikut merupakan piramida penduduk Kota Mojokerto tahun 2021.



Gambar 4. 2 Piramida Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, 2021 (diolah)



Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau disebut beban ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan produk dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Transisi demografi yang terjadi di Kota Mojokerto dapat dilihat berdasarkan angka rasio ketergantungan. Peluang bonus demografi terjadi karena angka rasio ketergantungan yang semakin rendah. Rasio ketergantungan pada tahun 2021 kota Mojokerto disajikan pada Tabel 4.3. Dari Tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan di Kota Mojokerto sebesar 40,18%, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif di Kota Mojokerto memiliki tanggungan sebanyak 40 - 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak lagi produktif.

Tabel 4.3. Komposisi Penduduk (persen) dan Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur, Tahun 2019 – 2021

Kelompok Umur (Tahun)	Tahun		
	2019	2020	2021
0-14	22,76	22,20	21,81
15-64	70,70	71,10	71,34
65+	6,39	6,70	6,85
Rasio Ketergantungan	41,44	40,64	40,18

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2020-2022

Menurunnya rasio ketergantungan dan meningkatnya penduduk usia produktif akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan penduduk muda dapat dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kondisi ini akan bermanfaat bagi pemerintah Kota Mojokerto, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi. Namun, jika tidak mampu menyiapkan dengan baik, maka akan terjadi permasalahan mendasar, diantaranya: peningkatan pengangguran yang besar dan masalah tingkat kesejahteraan, serta kemiskinan.

Jumlah penduduk yang banyak dan padat dapat menjadi pemacu pembangunan karena dianggap sebagai pasar potensial yang menjadi sumber permintaan berbagai macam barang dan jasa. Penduduk selanjutnya diharapkan dapat menggerakkan berbagai macam kegiatan sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi dan



menguntungkan semua pihak. Pemerintah Kota Mojokerto dapat memanfaatkan kepadatan penduduk ini dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas misalnya dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sehingga pada gilirannya dapat menciptakan penawaran tenaga kerja yang murah dalam jumlah memadai. Penciptaan lapangan pekerjaan ini selanjutnya dapat merangsang output yang lebih tinggi dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Data tahun 2021 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Mojokerto yang termasuk angkatan kerja sejumlah 69.355 meliputi bekerja sebesar 64.587 dan pengangguran 4.768. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 34.019 orang.

Tabel 4.4. Indikator Ketenagakerjaan Kota Mojokerto, Tahun 2019 – 2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	99.890	102.503	103.374
Angkatan Kerja	64.806	69.920	69.355
Jumlah Bekerja	63.091	65.208	64.587
TPAK (%)	65,09	68,21	67,09
TPT (%)	2,63	6,74	6,87

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2020-2022

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan (Tabel 4.4). Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja Kota Mojokerto meningkat 2,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan ini berlanjut di tahun 2021 namun dengan angka yang lebih rendah yaitu 0,85 persen. Sementara, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup berarti karena secara umum kedua angka tersebut selalu mengalami kenaikan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 dan 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 2,63 persen di tahun 2019 menjadi 6,74 persen di tahun 2020 dan 6,87 persen di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020.

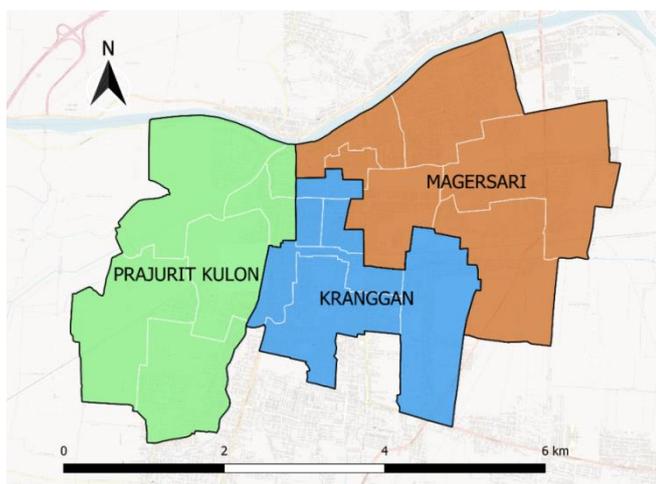
Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia membuat mobilitas manusia menjadi sangat terbatas. Perekonomian global dan Indonesia mengalami dampak yang parah selama kuartal kedua 2020 karena adanya mobilitas yang terbatas serta kebijakan kesehatan publik yang diberlakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Pembatasan



aktivitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada kegiatan usaha yang berimbas pada perekonomian. Kebijakan pemerintah telah banyak diterapkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, antara lain penutupan perbatasan wilayah dan larangan masuk, kebijakan penghentian operasional moda transportasi darat, laut, dan udara, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), himbauan pada kegiatan belajar, bekerja dan beribadah yang dilakukan dari rumah, serta pembatasan kegiatan sosial lainnya. Pembatasan ini membuat aktivitas ekonomi semakin menurun sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan dan atau kehilangan pendapatan karena dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya. Peningkatan angka TPT di Kota Mojokerto ternyata diikuti dengan peningkatan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dibandingkan angka tahun 2019. Angka pengangguran meningkat, tetapi di sisi lain jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja meningkat dan masih ada yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada. Menanggapi hal ini, pemerintah diharapkan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, memberi pelatihan dan pembinaan masyarakat agar mampu menciptakan lapangan usaha baru.

4.2. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kota Mojokerto terletak antara 7°28' Lintang Selatan dan antara 112°26' Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 20,21 km². Kota Mojokerto terdiri atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon di sebelah timur (7,41 km²), Kecamatan Kranggan di tengah wilayah (4,72 km²), dan Kecamatan Magersari di sebelah barat (8,08 km²). Masing-masing kecamatan terbagi dalam 6 kelurahan, sehingga total kelurahan di Kota Mojokerto sebanyak 18 kelurahan dengan Rukun Warga (RW) sejumlah 175 dan Rukun Tetangga (RT) sejumlah 676. Dilihat dari luas wilayah tiap kecamatan, maka luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Magersari yaitu hampir 40% dari luas wilayah Kota Mojokerto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kranggan dengan persentase 23% dari luas wilayah Kota Mojokerto. Gambar 4.3 berikut merupakan peta wilayah administrasi Kota Mojokerto.



Gambar 4. 3 Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022 (Diolah)

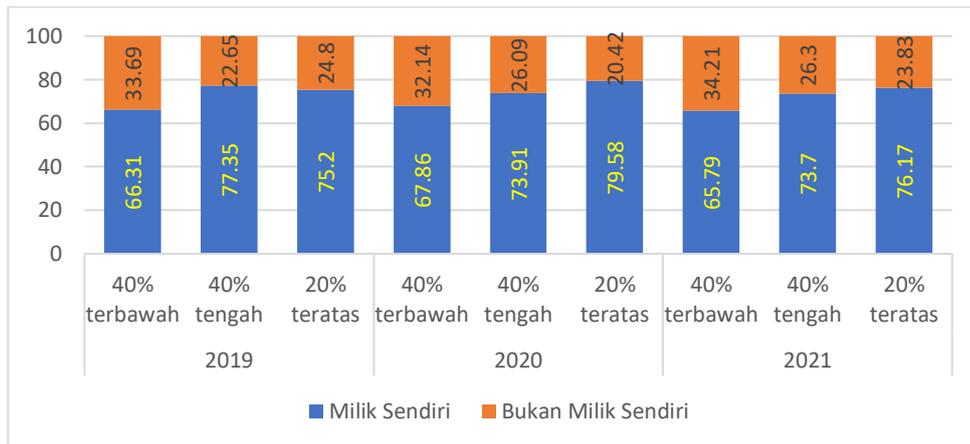
Berdasarkan posisi geografis dan batas administratifnya, Kota Mojokerto berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto.

- a. Sebelah Utara : Sungai Brantas
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

4.3. Kondisi Tempat Tinggal dan Rumah Tangga di Kota Mojokerto

Setelah pangan dan sandang, papan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Papan diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal yang secara fisik dapat dijadikan tempat berkumpul dan berinteraksi antar anggota keluarga serta bersosialisasi dengan lingkungan. Rumah sebagai tempat tinggal seharusnya memenuhi kriteria layak bagi penghuninya tanpa melihat status bangunan apakah milik sendiri atau lainnya. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap tempat tinggal layak huni jika memenuhi beberapa persyaratan diantaranya ketahanan bangunan seperti atap, dinding, dan lantai, kemudian kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

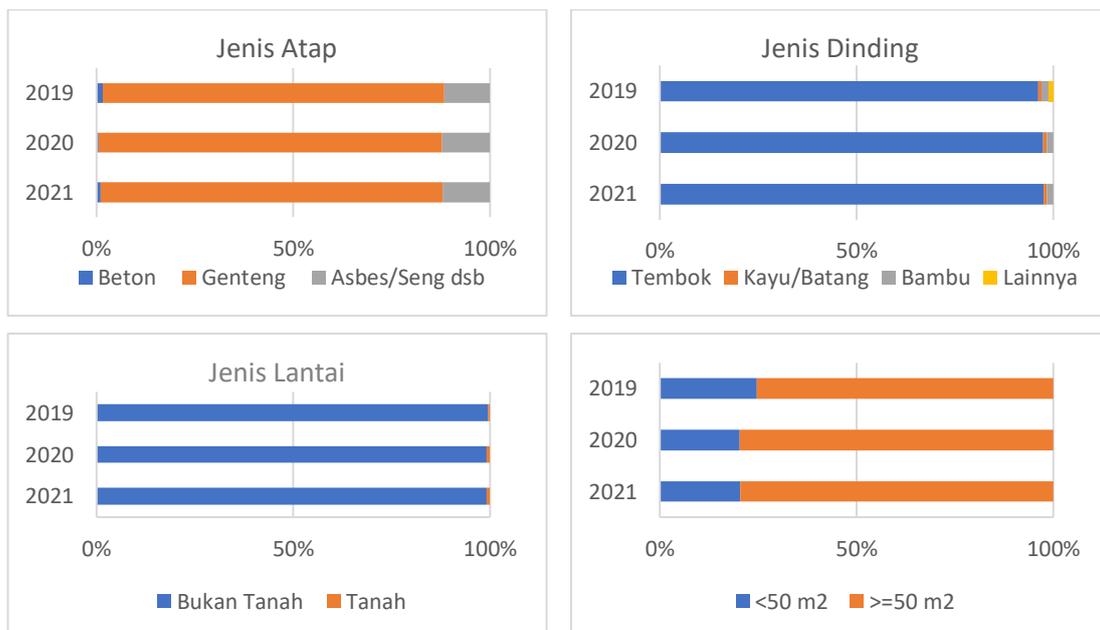
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, rumah tangga di Kota Mojokerto yang berstatus milik sendiri ada sebanyak 71,4 persen. Sisanya merupakan rumah kontrak 9,14 persen, rumah bebas sewa 19,16 persen, dan rumah dinas 0,29 persen. Secara rinci status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati

Sumber: Raw Data Susenas 2021, 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang ditunjukkan melalui karakteristik tingkat pengeluaran masyarakat maka proporsi untuk memiliki bangunan tempat tinggal semakin tinggi pula. Pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase kepemilikan bangunan tempat tinggal untuk semua kelompok pengeluaran dibandingkan tahun 2020.



Gambar 4. 5 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Kualitas Bangunan Rumah

Sumber: Raw Data Susenas 2021, 2022 (diolah)



Gambar 4.5 menyajikan data rumah dilihat dari kualitas bangunan. Dilihat dari kualitas bangunan, persentase rumah tangga yang sudah menggunakan atap dari beton dan genteng pada kurun waktu 2019 – 2021 yaitu di atas 86 persen, sedangkan sisanya menggunakan asbes/seng. Sebanyak lebih dari 97 persen rumah tangga di Kota Mojokerto pada tahun 2020 dan 2021 memiliki rumah dengan dinding tembok dan kurang dari 3 persen menggunakan kayu dan bambu sebagai dinding rumahnya.

Saat ini, seiring dengan perkembangan jaman kondisi rumah yang dihuni oleh sebagian besar penduduk sudah semakin baik dilihat dari sisi kualitas lantai yang dihuni, meskipun masih ada rumah yang berlantaikan tanah. Persentase rumah tangga dengan luas lantai rumah terluasnya bukan tanah ada sebanyak lebih dari 99 persen. Selanjutnya berdasarkan luas lantai, pada tahun 2021 sebanyak 79,5 persen luas bangunan rumahnya lebih dari atau sama dengan 50 m². Berdasarkan keempat kriteria tersebut sebagian besar kondisi perumahan di Kota Mojokerto dapat dikatakan relatif sudah baik dan layak huni.

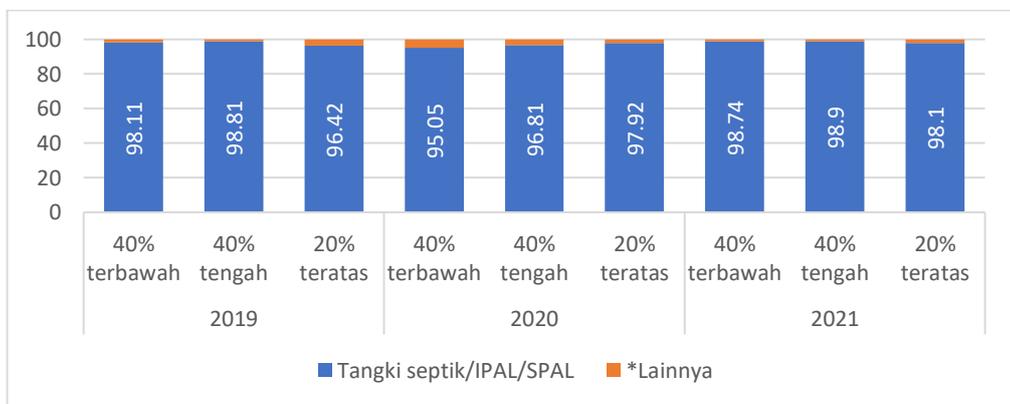
Pada penggunaan fasilitas tempat buang air besar (BAB), rata-rata rumah tangga di Kota Mojokerto sudah banyak yang memiliki fasilitas BAB dan fasilitas tersebut juga digunakan oleh rumah tangga itu sendiri, dengan persentase sebesar 92,68 persen, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Timur yang hanya 83,80 persen. Sisanya, rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB tetapi digunakan bersama-sama dengan rumah tangga lain atau menggunakan fasilitas untuk BAB secara bersama-sama di MCK komunal/ umum atau tidak memiliki fasilitas yaitu sebesar 7,32 persen. Penggunaan fasilitas BAB di Kota Mojokerto ternyata cukup berbeda jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran. Selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kelompok pengeluaran maka semakin besar pula persentase yang memiliki fasilitas BAB sendiri (Gambar 4.6), ini menunjukkan bahwa kepemilikan fasilitas BAB dapat juga digunakan sebagai ukuran yang membedakan tingkat kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. 6 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sumber: Raw Data Susenas 2021, 2022 (diolah)

Penggunaan kloset leher angsa banyak dipakai oleh rumah tangga yang memiliki fasilitas untuk BAB yang digunakan sendiri maupun secara bersama sama (99,65 persen). Sedangkan untuk pembuangan akhir tinja, mayoritas rumah tangga di Kota Mojokerto menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL baik di kelompok pengeluaran rendah, menengah, maupun atas. Persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja dilakukan ke dalam tangki septik, secara total sebesar 98,66 persen. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa fasilitas BAB di Kota Mojokerto relatif lebih baik jika dibandingkan dengan angka Jawa Timur yang sebesar 92,94 untuk penggunaan kloset leher angsa, dan 81,98 untuk pembuangan akhir dengan tangki septik.

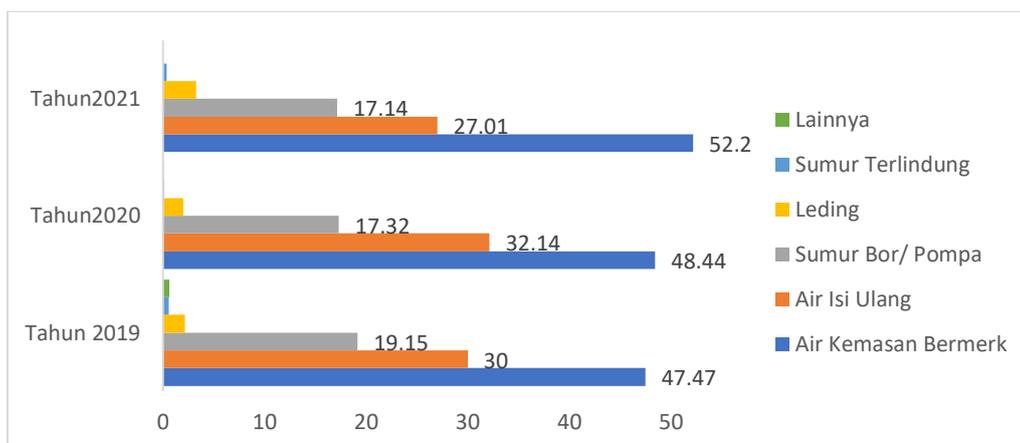


Gambar 4. 7 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja

Sumber: Raw Data Susenas 2021, 2022 (diolah)



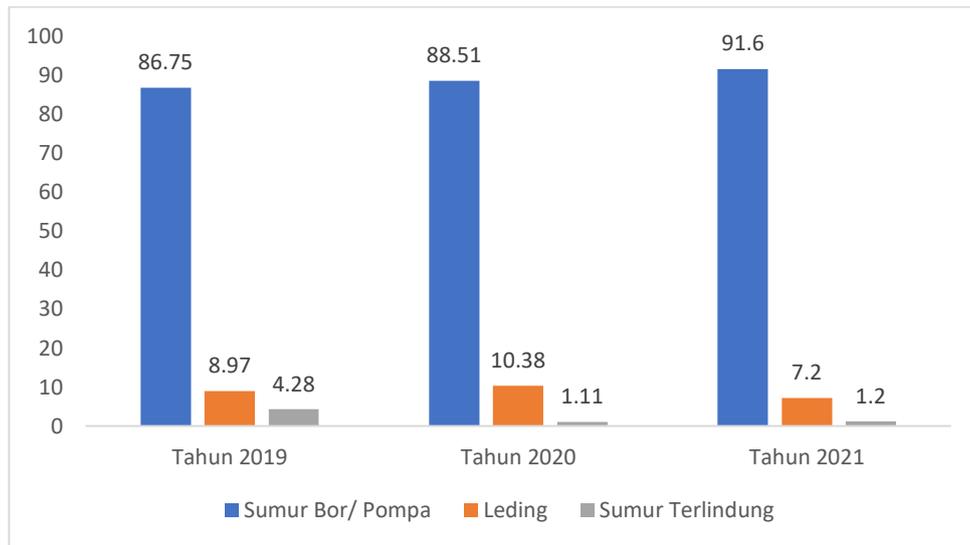
Gambar 4.8 menyajikan data rumah tangga berdasarkan sumber air minum yang diakses. Terlihat bahwa yang terbanyak secara berturut-turut berasal dari air kemasan bermerk, air isi ulang, dan sumur bor atau pompa. Pada tahun 2019, rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerk untuk memenuhi kebutuhan air minumnya ada sebanyak 47,47 persen. Pada tahun 2020 dan 2021, persentasenya terus naik menjadi 48,44 persen dan 52,2 persen. Berbeda dengan rumah tangga yang memilih menggunakan air isi ulang. Terjadi peningkatan sebesar 2,14 persen dari tahun 2019 ke 2020, namun turun menjadi 27,01 persen di tahun 2021. Secara kualitas sumber air minum yang diakses oleh rumah tangga sudah sangat baik, terlihat dari kondisi fisik sumber air utama untuk minum yang tidak keruh, berwarna, berasa, berbusa dan berbau.



Gambar 4. 8 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum (2019-2021)

Sumber: Raw Data Susenas 2021, 2022 (diolah)

Gambar 4.9 menyajikan informasi tentang prosentase rumah tangga berdasarkan pemenuhan kebutuhan air mandi/cuci/masak. Mayoritas rumah tangga di Kota Mojokerto pada kurun waktu 2019 – 2021 menggunakan sumur bor/pompa sebanyak 86,75 – 91,6 persen. Selain itu, sebanyak sekitar 7,2 – 10,38 persen rumah tangga menggunakan leding, sisanya menggunakan sumur terlindung.



Gambar 4. 9 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Mandi/Cuci/Masak, 2019-2021

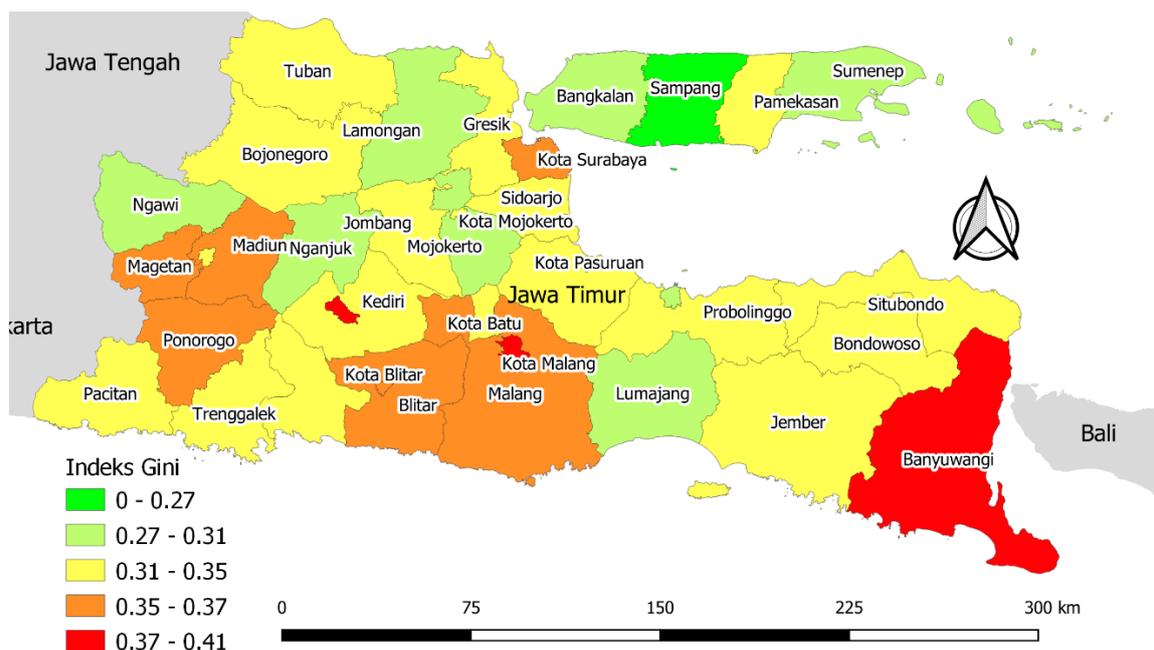
Sumber: Raw Data Susenas 2021, 2022 (diolah)



BAB V KONDISI INDEKS GINI KOTA MOJOKERTO

5.1. Gambaran Umum Indeks Gini Kota Mojokerto

Dua permasalahan besar yang sering dihadapi daerah otonom adalah ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Sebagaimana daerah otonom lainnya, Kota Mojokerto pun harus menghadapi dua masalah ini. Pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sampang merupakan kabupaten dengan indeks Gini terendah yaitu 0,27, kondisi ini juga berlaku pada tahun sebelumnya. Kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Selain Kabupaten Sampang terdapat 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Indeks Gini kurang dari 0,3 atau dapat dikategorikan memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, diantaranya adalah Kabupaten Lamongan, Sumenep, dan Kabupaten Mojokerto dengan nilai 0,29. Di sisi lain, Kota Malang memiliki Indeks Gini sebesar 0,41 dan merupakan wilayah dengan Indeks Gini tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kabupaten/kota lainnya tergolong memiliki tingkat ketimpangan yang sedang dengan indeks Indeks Gini antara 0,3 - 0,4, seperti disajikan pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, maka terdapat kecenderungan bahwa daerah kota memiliki Indeks Gini lebih tinggi daripada kabupaten.

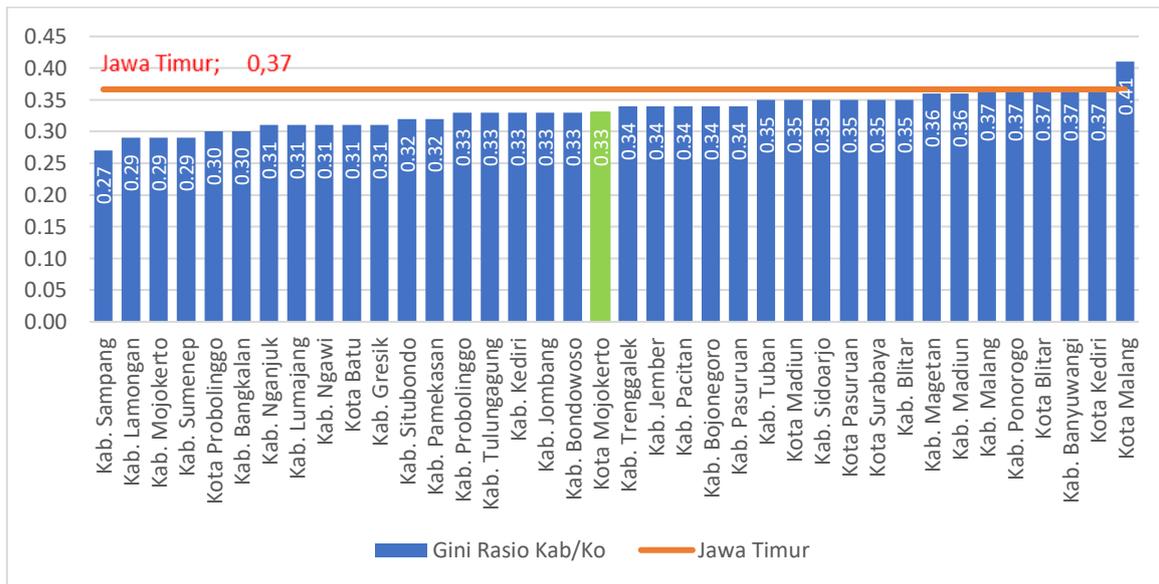


Gambar 5. 1 Persebaran Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah)

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa semua daerah kota di Provinsi Jawa Timur memiliki indeks Gini di antara 0,3 – 0,4 atau memiliki tingkat ketimpangan moderat. Kota Mojokerto pada kurun waktu tahun 2019 – 2021 memiliki Indeks Gini sebesar 0,31 - 0,35 yang artinya bahwa Kota Mojokerto dikategorikan memiliki tingkat ketimpangan kategori moderat atau sedang.



Gambar 5. 2 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

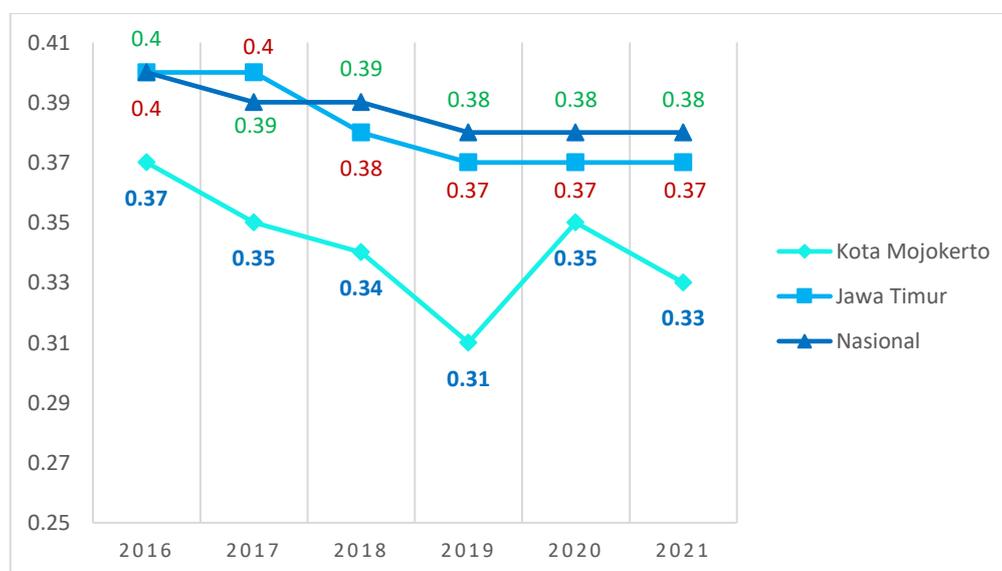
Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah)

Pada tahun 2021, Indeks Gini Kota Mojokerto sebesar 0,33 berada di tengah-tengah antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yaitu pada urutan ke-20 dari yang tertinggi. Kondisi ini lebih bagus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yang menempati urutan ke-7 tertinggi di Jawa Timur. Indeks Gini Kota Mojokerto lebih kecil 0,04 dibanding Indeks Gini Jawa Timur (0,37). Angka tersebut masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang terjadi di Kota Mojokerto berada dalam taraf sedang, karena berada dalam interval nilai 0,30-0,50. Pada tahun yang sama, Kota Malang dan Kota Kediri merupakan daerah yang memiliki Indeks Gini lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan Indeks Gini selama 2016-2021 Kota Mojokerto dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional disajikan pada Gambar 5.3. Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016 hingga 2021, Indeks Gini Kota Mojokerto berada pada kisaran 0,31-0,37. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Mojokerto



berada dalam kategori sedang atau moderat. Belum tampak pergeseran kategori ketimpangan selama kurun waktu tersebut, walaupun angkanya cenderung turun. Sepanjang periode pengamatan, tahun 2016 adalah tahun dimana Indeks Gini Kota Mojokerto berada pada level tertinggi yakni 0,37. Pada tahun-tahun berikutnya Indeks Gini Kota Mojokerto perlahan-lahan mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di angka 0,31 pada tahun 2019. Namun demikian, angkanya kembali naik menjadi 0,35 pada tahun 2020 dan turun menjadi 0,33 pada tahun 2021. Perubahan yang fluktuatif ini dapat mempengaruhi pemerataan pendapatan dan Pemerintah Kota Mojokerto tampaknya cukup waspada terhadap fenomena ini. Jika dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, Indeks Gini Kota Mojokerto selalu lebih rendah daripada Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Indeks Gini Indonesia.



Gambar 5. 3 Indeks Gini Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia tahun 2016-2021

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah) dan PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Pandemi Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 mulai memberikan dampak pada pola konsumsi masyarakat. Pembatasan aktifitas masyarakat dan kegiatan ekonomi memaksa masyarakat untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi. Beberapa pengeluaran yang bersifat tersier mulai ditinggalkan, pola konsumsi masyarakat beralih pada kebutuhan dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari Covid-19. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran masyarakat yang lebih menuju ke homogen, sehingga mengakibatkan



turunnya ketimpangan pengeluaran yang ditunjukkan dari turunnya Indeks Gini di tahun 2021.

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia membuat mobilitas manusia menjadi sangat terbatas. Pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada kegiatan usaha yang berimbas pada perekonomian. Kebijakan pemerintah telah banyak diterapkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, antara lain penutupan perbatasan wilayah dan larangan masuk, kebijakan penghentian operasional moda transportasi darat, laut, dan udara, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), himbuan pada kegiatan belajar, bekerja dan beribadah yang dilakukan dari rumah, serta pembatasan kegiatan sosial lainnya. Pembatasan ini membuat aktivitas ekonomi semakin menurun sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia dan termasuk Kota Mojokerto mengalami dampak yang parah selama kuartal kedua karena adanya mobilitas yang terbatas serta kebijakan kesehatan publik yang diberlakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

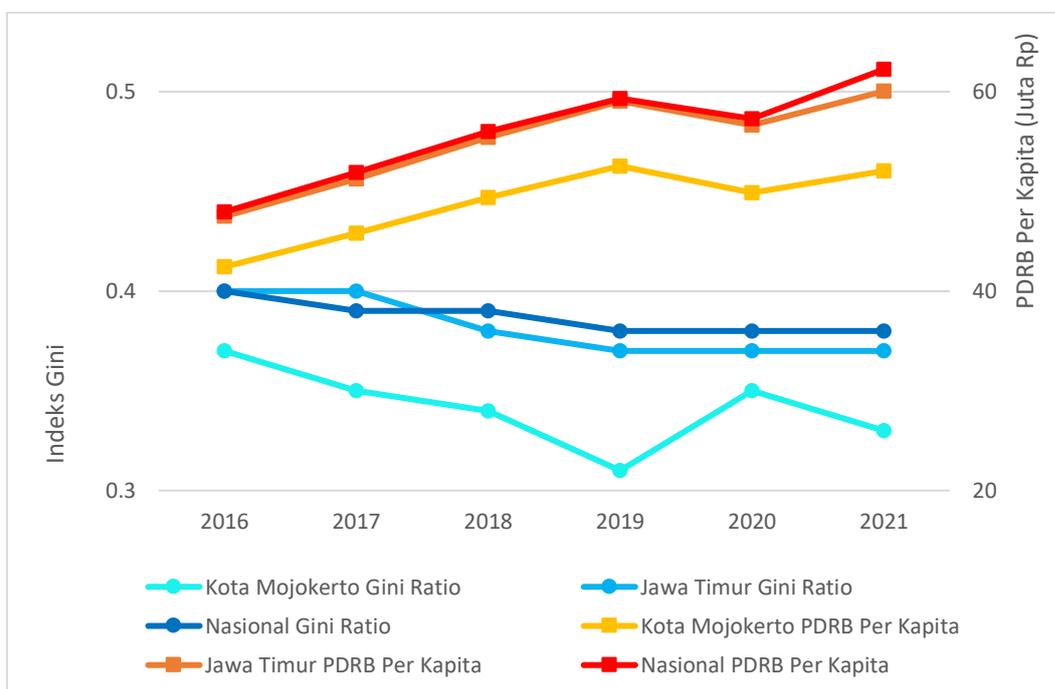
Pada Gambar 5.4. grafik Indeks Gini Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Indonesia dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita. PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator ekonomi makro terkait tingkat kemakmuran penduduk pada suatu daerah/wilayah. Ukuran ini dapat menggambarkan pendapatan per kapita penduduk di suatu daerah secara makro. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Mojokerto atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, tetapi kembali menurun di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian diberbagai daerah mengalami guncangan ekonomi (bahkan resesi ekonomi). Pendapatan per kapita Kota Mojokerto yang diukur dari nilai PDRB per kapita selama kurun waktu 2016 – 2021 ternyata selalu di bawah angka provinsi dan nasional. Namun demikian pola yang dibentuk antar tahun sama dengan pola provinsi dan nasional. Pada tahun 2016 PDRB per



kapita tercatat sebesar 42,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 52,54 juta rupiah (lihat Gambar 5.4). Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 49,84 juta rupiah. Namun, pada tahun 2021 naik kembali menjadi 52,04 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih disebabkan oleh faktor inflasi.

Berdasarkan perbandingan antara Indeks Gini dan PDRB per kapita terlihat bahwa secara umum meningkatnya PDRB per kapita diikuti dengan menurunnya angka Indeks Gini. Hal ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan yang diikuti dengan penurunan kesenjangan. Namun demikian perlu diingat bahwa meningkatnya PDRB per kapita tersebut dapat saja disebabkan karena adanya inflasi (kenaikan harga-harga komoditas). Oleh karena itu pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kestabilan harga-harga komoditas di daerahnya atau menjaga inflasi agar tidak meningkat secara drastis.



Gambar 5. 4 Indeks Gini dan PDRB Per Kapita Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia tahun 2016-2021

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah) dan PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Selanjutnya, laju pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2021 disajikan pada Gambar 5.5. Pada tahun 2020,



hampir seluruh sektor mengalami laju pertumbuhan yang negatif (kontraksi ekonomi) kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara umum Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling tahan terhadap pandemi Covid-19, ini juga terjadi di Kota Mojokerto yang membuat sektor ini menduduki posisi pertama sebagai sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi (8,16 persen). Namun demikian sektor ini mempunyai kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB Kota Mojokerto yaitu hanya 0,6 persen. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan yaitu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta sektor Informasi dan Komunikasi. Kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan di atas 7 persen yaitu 8,06 sebesar 7,87 persen. Di sisi lain, sektor Jasa Lainnya mengalami kontraksi sebesar 14,50 persen dibandingkan tahun lalu, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami kontraksi sebesar 9,20 persen. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan data PDRB dari BPS, secara umum nilai PDRB Kota Mojokerto pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya produksi hampir di semua lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Mojokerto tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 4.976.489,77 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 4.801.464,04 juta rupiah pada tahun 2020. Artinya bahwa selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto sebesar 3,65 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dari tahun 2019 yakni pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65 persen.

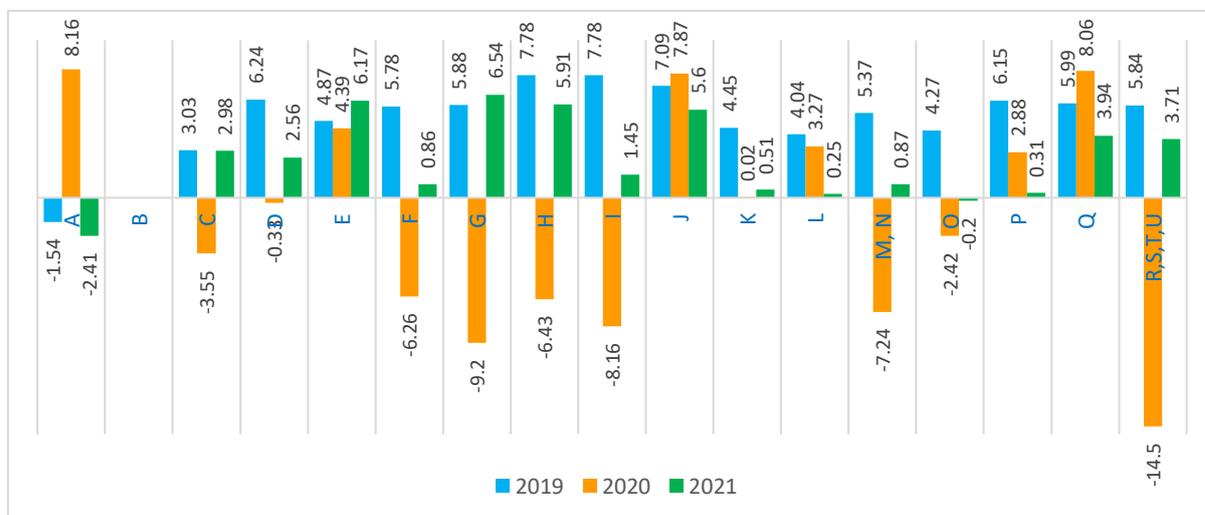
Pertumbuhan ekonomi selama 2021 membaik dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih mengalami perlambatan di banding tahun 2019 karena kinerja sebagian besar kategori mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, yaitu sebesar 6,54 persen. Penyebabnya adalah peningkatan yang cukup signifikan pada penjualan mobil akibat subsidi pajak penjualan oleh pemerintah. Selain itu pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan dibukanya kembali pusat perbelanjaan membuat sektor ini naik pesat. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada,



dimana 14 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif 1 sampai dengan 6 persen. Sedangkan dua lapangan usaha lainnya tercatat mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) tetapi tidak terlalu rendah, yaitu -2,41 persen dan -0,20 persen.

Empat belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar tersebut antara lain: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 6,54 persen; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 6,17 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,91 persen; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tercatat sebesar 5,60 persen; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,94 persen; lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 3,71 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,98 persen; lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,56 persen; lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum tercatat sebesar 1,45 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,87 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,86 persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,51 persen; lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 0,31 persen serta lapangan usaha Real Estat sebesar 0,25 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,20 persen; dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -2,41 persen. Fluktuasi pertumbuhan dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih disebabkan karena kontribusi dari sektor tersebut yang kecil.





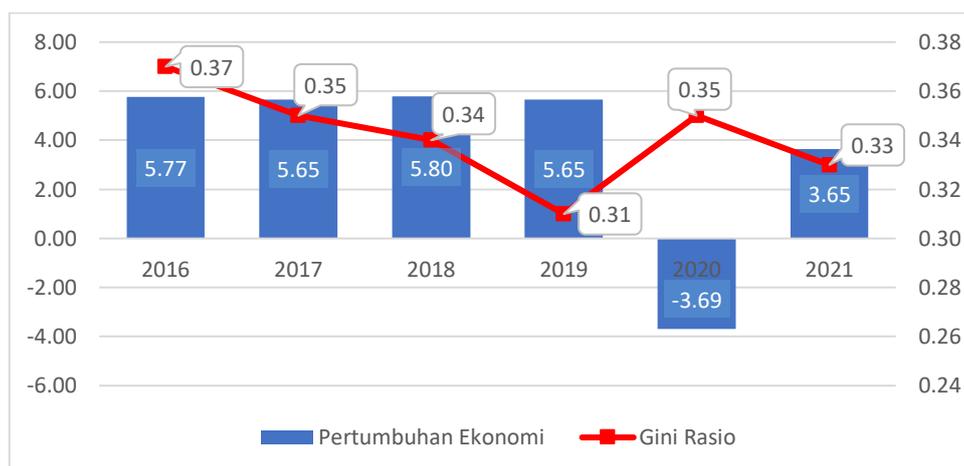
Keterangan:

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	J	Informasi dan Komunikasi
B	Pertambangan dan Penggalian	K	Jasa Keuangan dan Asuransi
C	Industri Pengolahan	L	Real Estate
D	Pengadaan Listrik dan Gas	M,N	Jasa Perusahaan
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
F	Konstruksi	P	Jasa Pendidikan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
H	Motor	R,S,T,U	Jasa lainnya
I	Transportasi dan Pergudangan		
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		

Gambar 5. 5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2019-2021
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022 (Diolah)

Permasalahan utama di negara atau daerah yang sedang berkembang adalah adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Pemilihan salah satu hal akan mengorbankan yang lain. Beberapa studi tentang hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Hasilnya, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan membaik. Berbeda lagi untuk daerah yang akan lepas landas dari berkembang menuju maju, yang biasanya kedua indikator tersebut masih sering berfluktuatif.

Gambar 5.6 menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan tren Indeks Gini. Pada tahun 2017 Indeks Gini dan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami penurunan. Kemudian terlihat bahwa angka Indeks Gini menunjukkan penurunan pada saat laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di tahun 2018. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami perlambatan. Peristiwa ini diikuti dengan penurunan Indeks Gini dari 0,34 menjadi 0,31. Akan tetapi, pada tahun 2020 disaat Indeks Gini mengalami peningkatan dari 0,31 menjadi 0,35 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang sangat tajam yaitu terkontraksi minus 3,69 persen. Hal ini diduga akibat dampak dari pandemi covid-19 yang menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya di tahun 2021 kondisinya semakin membaik, pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh sebesar 3,65 persen yang diikuti penurunan Indeks Gini menjadi 0,33.



Gambar 5. 6 Pertumbuhan Ekonomi dan *Indeks Gini* di Kota Mojokerto Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah) dan PDPM DKPU ITS, 2022

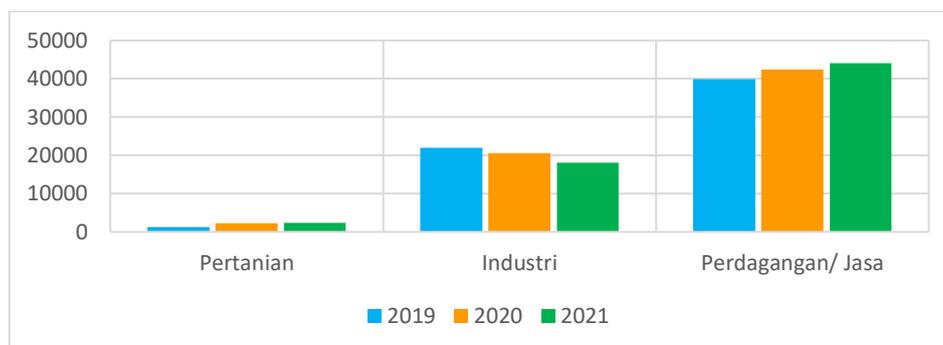
Keterkaitan erat antara laju pertumbuhan ekonomi dan *Indeks Gini* dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan stabilitas sosial. Hal ini telah lama menjadi bahan diskusi para ekonom. Kesenjangan pembangunan antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kesenjangan spasial antar daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi perubahan distribusi sumber daya antar sektor, balas jasa terhadap faktor produksi termasuk di dalamnya upah/gaji. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan adanya perubahan dalam distribusi pendapatan.

Program-program penanggulangan kemiskinan sebagai program prioritas dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu upaya pemerataan distribusi pendapatan. Kegiatan ekonomi yang terpusat pada suatu daerah tertentu secara langsung akan berdampak pada kesenjangan pendapatan antar daerah. Hal ini menciptakan kondisi timpang dimana kesejahteraan masyarakat di daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi relatif rendah dibanding daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dari kondisi tersebut, patut diduga bahwa upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Kota Mojokerto berada pada jalur yang tepat untuk mengatasi kesenjangan. Meskipun demikian perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk meyakinkan hubungan antara kedua hal tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir struktur perekonomian Kota Mojokerto didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan; serta



Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Mojokerto dan penyerapan tenaga kerja di setiap sektor. Pada gambar 5.7 disajikan data tentang penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha menurut Lapangan Pekerjaan Utama tahun 2019-2021.



Gambar 5. 7 Penyerapan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2019-2021 *Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah)*

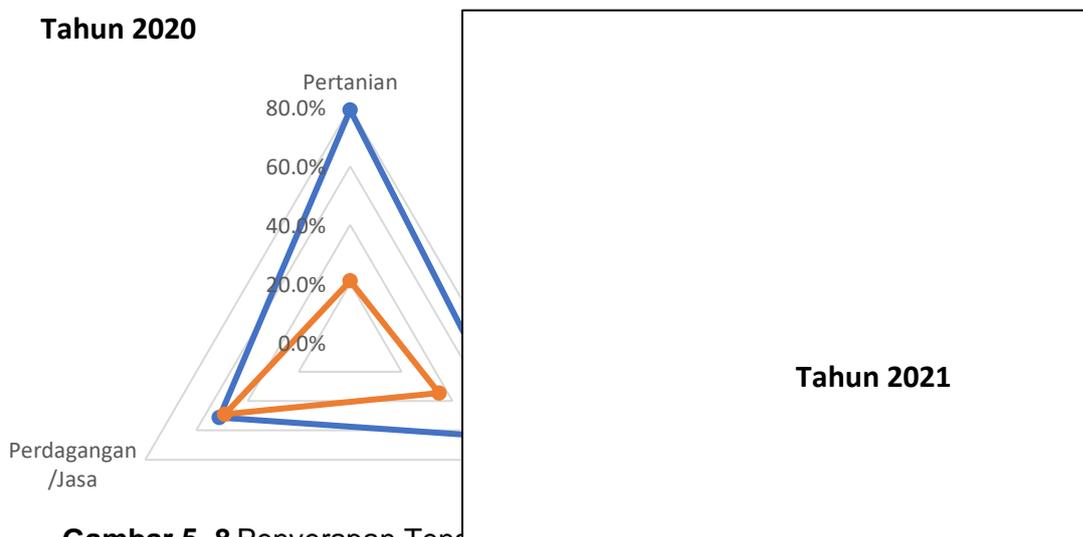
Jika penduduk bekerja dikelompokkan dalam 3 sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri (mencakup penggalian, industri, listrik, dan konstruksi), serta sektor perdagangan/jasa (mencakup sektor perdagangan, transportasi/ komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa), maka selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan. Meningkatnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dimungkinkan karena semakin beragamnya metode tanam saat ini, kendatipun di perkotaan dengan minim lahan, bukan berarti tidak bisa bertani, bertani bisa dilakukan dengan metode hidroponik, dan sebagainya. Sejalan dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan/ jasa yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan sektor industri mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, kebijakan PSBB diterapkan di tahun 2020, sebagai dampaknya banyak industri mengurangi jumlah karyawan atau bahkan gulung tikar sehingga tidak menutup kemungkinan pekerja sektor industri beralih ke sektor perdagangan/jasa maupun pertanian.

Berdasarkan Gambar 5.7 terlihat bahwa pada tahun 2021, dari 64.587 pekerja di Kota Mojokerto, sebanyak 44.109 orang bekerja di sektor perdagangan/jasa. Dibanding tahun 2020 dan 2019, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang perdagangan/jasa. Peningkatan aktivitas ekonomi yang disertai dengan penurunan jumlah pekerja di sektor industri, pada tahun 2019 jumlah pekerja di sektor industri 21.960 orang,



turun menjadi 20.639 di tahun 2020, dan menjadi 18.069 orang di tahun 2021. Pada rentang waktu yang sama, jumlah pekerja di sektor pertanian adalah 1.270 pada tahun 2019, naik menjadi 2.227 di tahun 2020, dan 2.409 di tahun 2021.

Penyerapan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama tahun 2020-2021 disajikan pada Gambar 5.8. Dibandingkan pekerja laki-laki, pekerja perempuan jumlahnya lebih sedikit terutama pada lapangan usaha pertanian dan industri. Hal ini terlihat dari persentase tenaga kerja di sektor industri yakni 74 persen banding 26 persen. Sementara di sektor pertanian, kontribusi pekerja perempuan sebesar 29,4 persen. Pada sektor perdagangan/jasa, terlihat bahwa ada keseimbangan dalam hal kontribusi tenaga kerja dari masing-masing gender. Pada tahun 2020, sebanyak 51,1 persen dari total tenaga kerja di sektor perdagangan/jasa merupakan pekerja laki-laki dan sisanya sebanyak 48,9 persen adalah pekerja perempuan. Kondisi ini berubah pola pada tahun 2021, dimana persentase pekerja perempuan di sektor perdagangan/jasa sebanyak 51,7 persen, sedangkan laki-laki sebanyak 48,3 persen.



Gambar 5. 8 Penyerapan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020-2021

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah)

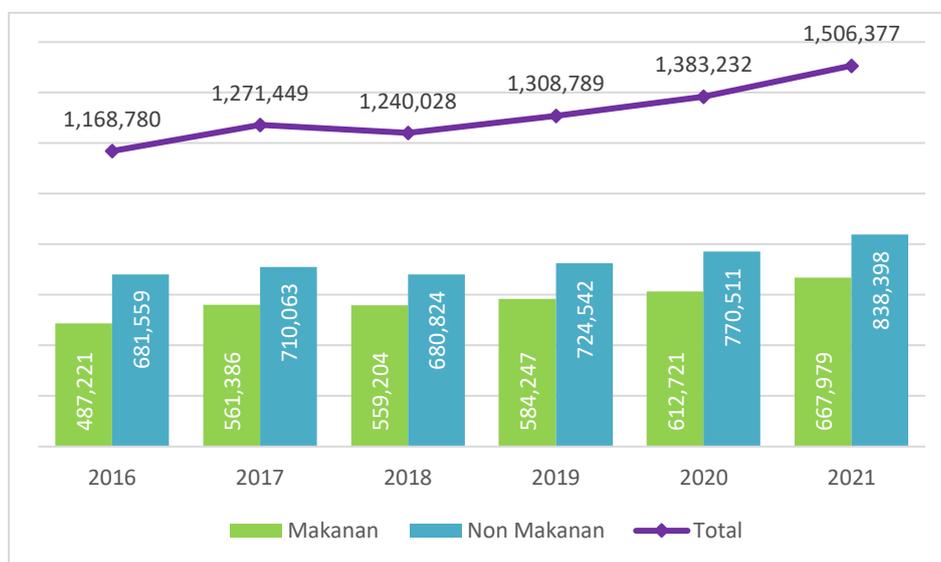
5.2. Pola Konsumsi Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dari jumlah pendapatan yang diterima. Akan tetapi, cukup sulit menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk melalui pendekatan pendapatan karena pada umumnya tidak mudah bagi masyarakat untuk



mencatat arus pendapatannya. Oleh karena itu pada pembahasan kali ini, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Mojokerto diukur melalui pendekatan pengeluaran, khususnya pola alokasi konsumsi rumah tangga.

Pola konsumsi rumah tangga dibedakan menurut konsumsi makanan dan non makanan. Rumah tangga dengan pendapatan tinggi cenderung menggeser porsi pengeluaran makanan mereka ke pengeluaran non makanan, dengan kata lain rumah tangga yang lebih banyak menyisihkan pendapatan untuk belanja nonmakanan dianggap lebih sejahtera daripada yang lebih banyak menghabiskan pendapatan untuk belanja makanan. Di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga, diantaranya pengeluaran untuk pendidikan, liburan, olahraga, dan sejenisnya. Berbeda halnya pada negara yang masih berkembang, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih mendominasi dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga.



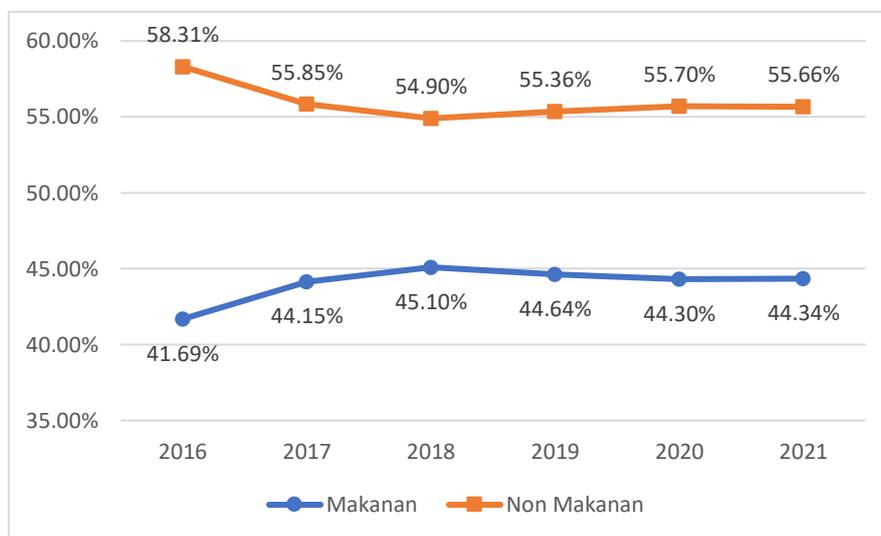
Gambar 5. 9 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022 (Diolah)

Gambar 5.9 menyajikan data rata-rata pengeluaran per kapita menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016-2021. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pengeluaran per kapita Kota Mojokerto mempunyai pola selalu meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebesar 1.240.028 rupiah per bulan, nilai ini terus meningkat hingga mencapai



1.506.377 rupiah pada tahun 2021. Pengeluaran per kapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 123.145 rupiah. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Mojokerto berada pada taraf sejahtera terlihat dari porsi pengeluaran yang lebih terkonsentrasi pada pengeluaran non makanan selama 6 tahun terakhir.



Gambar 5. 10 Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016-2021

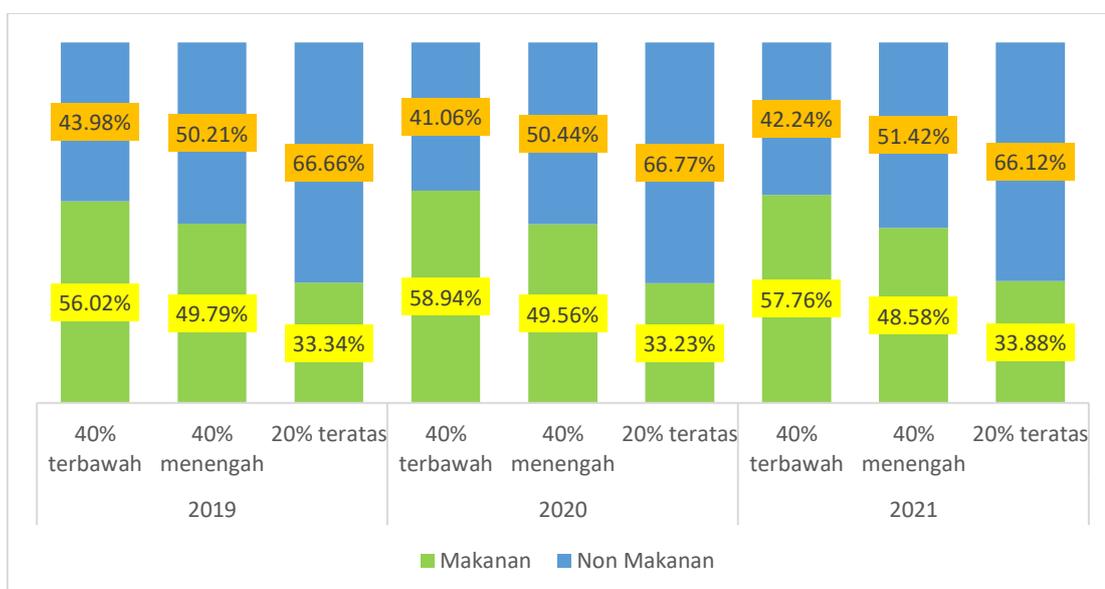
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022 (Diolah)

Jika dilihat pada persentase pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Mojokerto tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa persentase pengeluaran untuk kelompok makanan meningkat dari tahun 2016 hingga 2018, namun mengalami penurunan mulai tahun 2019. Di tahun 2019, persentase pengeluaran untuk kelompok makanan turun menjadi 44,64 persen dan menjadi 44,30 persen di tahun 2021. Melalui peristiwa ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 masyarakat Kota Mojokerto mengalami peningkatan kesejahteraan dikarenakan porsi pengeluaran makanan mengalami penurunan disertai peningkatan porsi pengeluaran bukan makanan. Namun demikian di tahun 2021, porsi pengeluaran makanan kembali naik diiringi turunnya porsi non makanan, walaupun kecil namun ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pada kelompok pengeluaran non makanan yang dimungkinkan merupakan dampak pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Jika dilihat menurut kelompok pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 5.11, pada tahun 2021, 40 persen penduduk Kota Mojokerto dengan pendapatan terendah, persentase pengeluaran untuk makannya masih berada di level 57,76 persen. Angka ini turun 1,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Penduduk dengan tingkat ekonomi



menengah, membelanjakan 49,58 persen pendapatannya untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sekitar 51,42 persen mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Porsi pengeluaran makanan pada kelompok ini turun sebesar 0,98 persen dibandingkan tahun 2020. Sementara penduduk yang kondisi ekonominya mapan, hanya menyisihkan sekitar 33,88 persen pendapatannya untuk makanan dan hampir sebagian besar (66,12 persen) menghabiskannya untuk kebutuhan non makanan. Jika pada kelompok pendapatan terendah dan menengah pengeluaran non makanan terjadi kenaikan, maka berbeda dengan di kelompok penduduk berpendapatan tinggi (mapan). Hal ini juga menguatkan dugaan bahwa penurunan pada kelompok pengeluaran non makanan merupakan dampak pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang lebih dirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan tinggi.



Gambar 5. 11 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pendapatan Tahun 2019-2021.

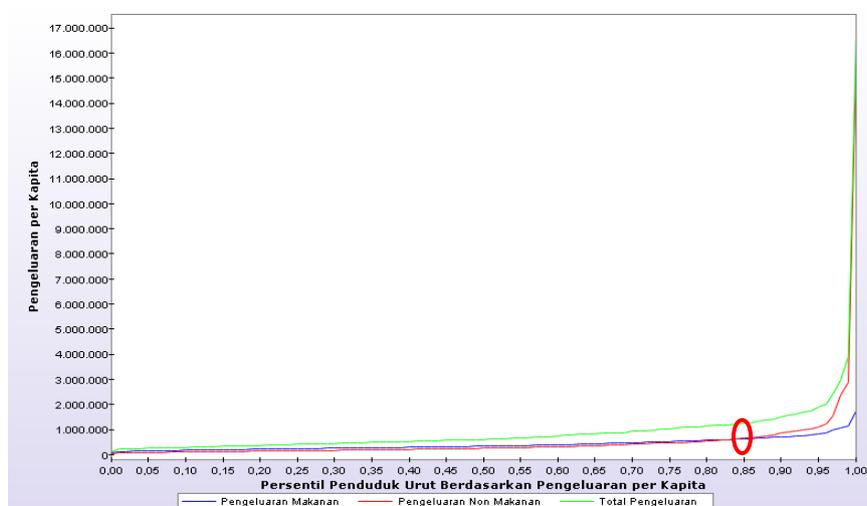
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022 (Diolah)

Secara umum, perubahan porsi pengeluaran makanan dan non makanan di masing-masing kelompok pendapatan masih tergolong kecil dan berfluktuatif. Dampak pandemi Covid-19 juga terlihat melalui pola makanan untuk masing-masing kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan rendah dan menengah menggeser sebagian porsi pengeluaran makanan mereka ke non makanan, sedangkan masyarakat dalam kelompok pendapatan tinggi menggeser sebagian porsi pengeluaran non makanan ke pengeluaran makanan.



Namun demikian nilai pergeseran yang kecil menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak pada pola pengeluaran masyarakat di Kota Mojokerto.

Pen's Parade digunakan untuk memvisualisasikan kondisi distribusi pendapatan masyarakat. *Pen's Parade* disusun dengan mengurutkan pendapatan mulai dari terkecil hingga terbesar, kemudian mengelompokkannya ke dalam persentil serta menggambarkannya dalam bentuk grafik. Untuk mengetahui kondisi distribusi pendapatan masyarakat Kota Mojokerto melalui *Pen's Parade*, indikator pendapatan penduduk didapatkan melalui pendekatan pengeluaran. Pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran makanan mendominasi hingga persentil ke 85. Mulai persentil 86 ke atas, porsi pengeluaran makanan terlampaui oleh pengeluaran non makanan. Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai: hanya sekitar 14 persen penduduk Kota Mojokerto yang memiliki kesejahteraan di atas rata-rata. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 5.12.



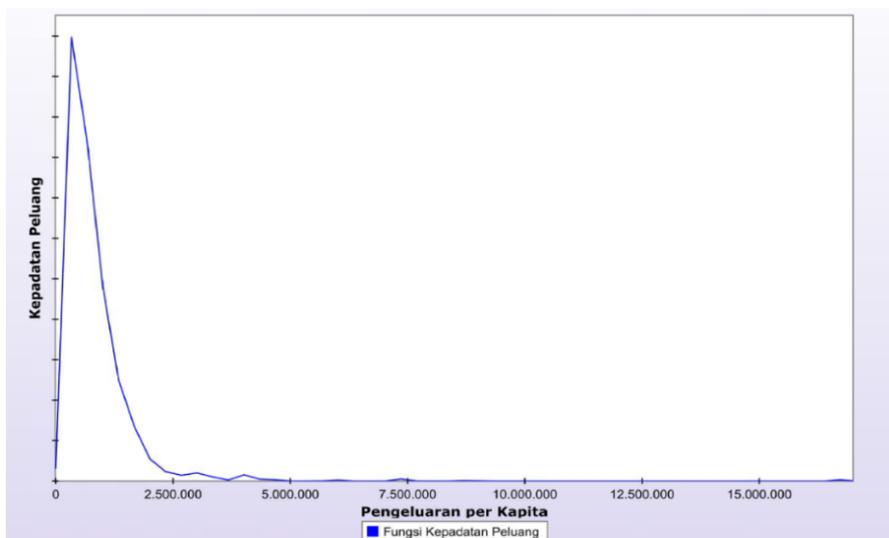
Gambar 5. 12 Pen's Parade Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Mojokerto menurut jenis Pengeluaran Tahun 2021

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Gambar 5.13 adalah histogram yang memiliki bentuk tidak simetris, melainkan berbentuk sangat menceng kanan atau *positive skew*. Histogram ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran per kapita Kota Mojokerto terkonsentrasi di sisi kiri. Hal ini berarti bahwa ada lebih banyak penduduk yang pengeluaran per kapitanya kurang dari rata-rata. Kelompok penduduk ini dapat dikatakan sebagai kelompok rentan miskin. Untuk kelompok rentan miskin, guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat membawa mereka ke kelompok miskin. Histogram tersebut juga memperlihatkan bahwa ada sedikit penduduk



yang pengeluaran per kapitanya sangat tinggi dan jauh di atas rata-rata. Fenomena seperti ini terjadi di hampir setiap daerah.



Gambar 5. 13 Distribusi Pengeluaran Kota Mojokerto Tahun 2021

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

5.3. Ketimpangan Menurut *Indeks Gini*

Indeks Gini Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi namun tetap bertahan pada kategori moderat (Tabel 5.1). Tercatat pada tahun 2016 Indeks Gini menyentuh angka 0,37, kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 0,35. Indeks Gini Kota Mojokerto terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 menjadi 0,31 kemudian naik cukup signifikan sebanyak 0,04 menjadi 0,35. Namun demikian angka tersebut kembali turun di tahun 2021 menjadi 0,33.

Tabel 5.1. *Indeks Gini Kota Mojokerto 2016 – 2021*

Tahun Pengamatan	Indeks Gini
2016	0,37
2017	0,35
2018	0,34
2019	0,31
2020	0,35
2021	0,33

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2021 (Diolah)

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketimpangan yang dialami Kota Mojokerto berada dalam kategori sedang atau dengan kata lain distribusi pendapatan cukup merata. Angka Indeks Gini yang berfluktuatif di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa



Kota Mojokerto berada pada kondisi yang berkembang menuju ke maju. Selain itu, pandemi Covid-19 juga turut andil pada penurunan angka Indeks Gini pada tahun 2021 di Kota Mojokerto yang terlihat dari perubahan pola konsumsi makanan dan non makanan menurut kelompok pendapatan pada bahasan sebelumnya.

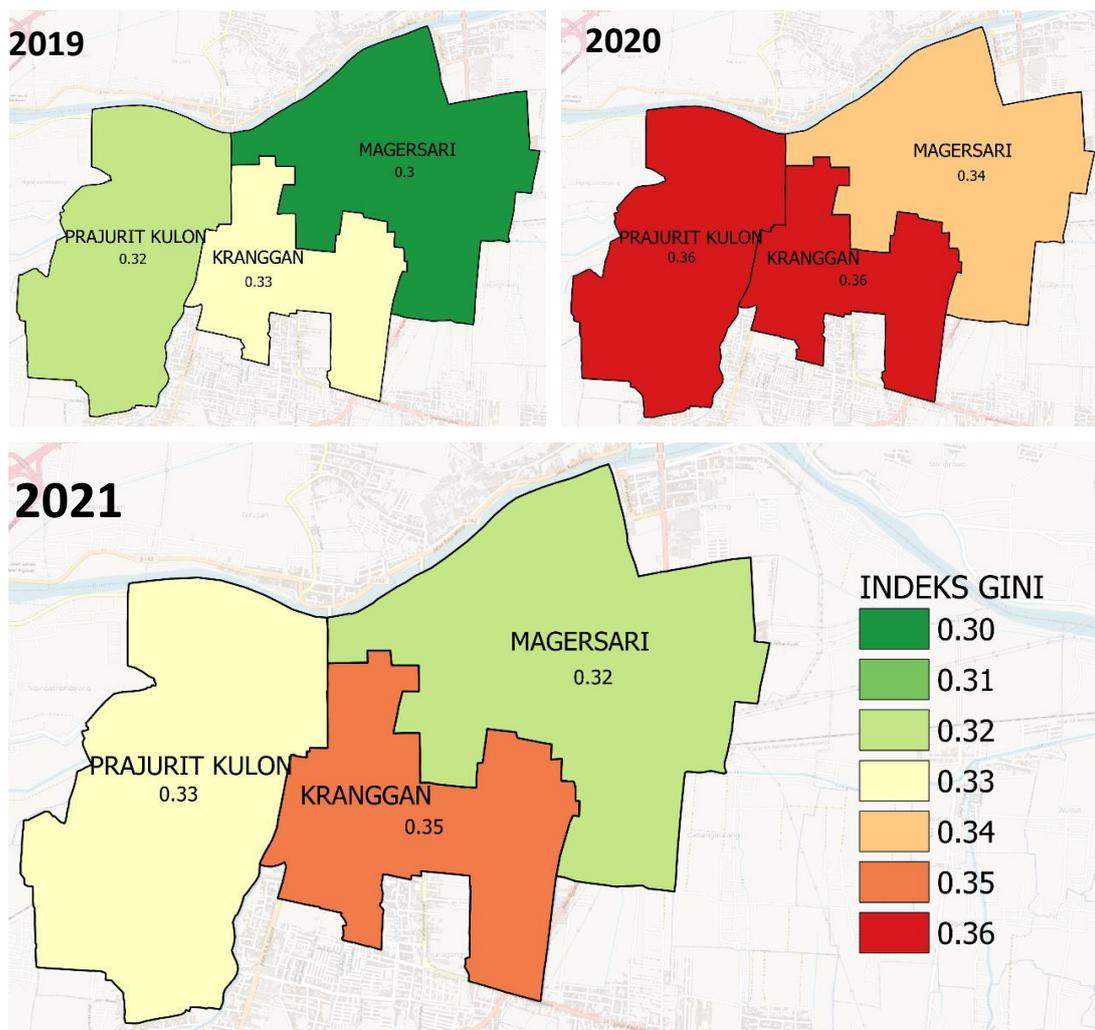
Tabel 5.2. Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2021

No	Kecamatan	Indeks Gini		
		2019	2020	2021
1	Prajurit Kulon	0,32	0,36	0,33
2	Magersari	0,30	0,34	0,32
3	Kranggan	0,33	0,36	0,35

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Secara administratif, Kota Mojokerto dibagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan. Dalam 3 tahun terakhir, Kecamatan Magersari merupakan wilayah dengan Indeks Gini paling rendah, diikuti Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Kranggan. Indeks Gini per kecamatan disajikan pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.14.

Pada tahun 2019, Indeks Gini Kecamatan Magersari adalah 0,30 kemudian naik sebanyak 0,04 hingga mencapai 0,34 di tahun 2020, dan turun kembali menjadi 0,32 di tahun 2021. Kecamatan Prajurit Kulon juga mengalami kenaikan sebanyak 0,04 yang menyebabkan kecamatan tersebut mempunyai ketimpangan yang sama dengan Kecamatan Kranggan yaitu 0,36 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka tersebut turun sebesar 0,03 poin menjadi 0,33, berbeda dengan Kecamatan Kranggan yang hanya turun 0,01 poin sehingga membuat *Indeks Gini* di Kecamatan Kranggan kembali menjadi yang tertinggi.



Gambar 5. 14 Peta *Indeks Gini* Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2021

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2021 (Diolah)

Tabel 5.3 menyajikan data *Indeks Gini* berdasarkan alokasi konsumsi. Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa ketimpangan di Kota Mojokerto terutama disebabkan oleh ketimpangan pada pengeluaran bukan makanan (non makanan). Selama 3 tahun terakhir, ketimpangan yang terjadi pada pengeluaran non makanan berkisar di atas 0,4 dan termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk pengeluaran makanan, Kota Mojokerto sejak 2019-2021, memiliki Indeks Gini yang relatif rendah. Pola ini umum terjadi di berbagai daerah, dimana pengeluaran non makanan lebih heterogen dibandingkan dengan pengeluaran makanan. Yang perlu dicermati adalah turunnya Indeks Gini pada kelompok non makanan yang mengindikasikan dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi



Covid-19. Berbeda dengan Indeks Gini pada kelompok makanan yang stabil dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Tabel 5.3. Indeks Gini Menurut Pengeluaran di Kota Mojokerto 2019 – 2021

Kelompok Pengeluaran	Indeks Gini		
	2019	2020	2021
Makanan	0,22	0,25	0,25
Bukan Makanan	0,42	0,47	0,44

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Indeks Gini berdasarkan gender disajikan pada Tabel 5.4. Dilihat dari perspektif gender, tidak ada perbedaan signifikan pada Indeks Gini penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Mojokerto pada 3 tahun terakhir. Keduanya sama-sama berada dalam kategori ketimpangan moderat. Faktor yang diduga menjadi penyebab hal ini adalah baik laki-laki maupun perempuan mayoritas bekerja di sektor jasa. Sektor jasa memiliki ragam pekerjaan yang besar sehingga berpengaruh pula pada besarnya variasi pendapatan yang diterima. Meski begitu, pendapatan yang diterima antar penduduk laki-laki lebih merata dibanding perempuan. Pola Indeks Gini menurut jenis kelamin tersebut tetap sama walaupun terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020 – 2021.

Tabel 5.4. Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2021

Jenis Kelamin	Indeks Gini		
	2019	2020	2021
Laki-laki	0,31	0,35	0,33
Perempuan	0,32	0,36	0,34

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Pendidikan menjadi faktor penting dalam investasi sumber daya manusia. Pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan ketimpangan pendapatan tenaga kerja. Salah satu literatur menyebutkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan lebih tinggi untuk tenaga kerja yang lebih terampil (tenaga kerja pendidikan tinggi). Literatur lain mengaitkan dengan pengembalian (*pay-off*) dari biaya pendidikan/ sekolah yang telah dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Oleh karenanya, pendidikan yang merata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Indeks Gini Kota Mojokerto menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel 5.5. Berdasarkan hasil pengolahan data, secara umum Indeks Gini tahun 2021 menurun di semua tingkat pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan



terendah (SD dan Tidak Lulus SD). Poin penurunannya semakin besar untuk tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada kelompok pendidikan Perguruan Tinggi yaitu 0,04.

Tabel 5.5. Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2019 – 2021

Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	Indeks Gini		
	2019	2020	2021
SD dan Tidak Lulus SD	0,28	0,31	0,32
SMP atau Sederajat	0,30	0,33	0,32
SMA atau Sederajat	0,32	0,36	0,34
Perguruan Tinggi	0,31	0,35	0,31

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Pada kurun waktu 2019 – 2020, pendapatan yang diterima masyarakat di Kota Mojokerto dengan pendidikan SD dan tidak lulus SD adalah yang paling merata dibanding tingkat pendidikan yang lain. Namun di tahun 2021 masyarakat dengan pendidikan Perguruan Tinggi mempunyai Indeks Gini yang paling rendah. Pendapatan yang diterima oleh kelompok pendidikan SMA/Sederajat adalah yang paling tidak merata dibanding kelompok lainnya pada kurun waktu 2019 – 2021. Hal ini mengindikasikan adanya variasi pendapatan yang relatif besar pada kelompok ini. Beragamnya bidang baik formal maupun non formal yang digeluti oleh tenaga kerja pada kelompok pendidikan SMA/Sederajat diduga menjadi penyebab besarnya variasi pendapatan yang diperoleh. Dampak pandemi Covid-19 terhadap Indeks Gini Kota Mojokerto menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pula penurunan nilainya, yang berarti semakin homogen pengeluarannya. Hal ini juga sesuai dengan analisis sebelumnya terkait dengan dampak pandemi menurut jenis pengeluaran dan kelompok pendapatan.

Selanjutnya, Indeks Gini menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 5.6. Pada tahun 2019 dan 2020, masyarakat yang bekerja di sektor jasa mempunyai Indeks Gini yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yakni 0,35 dan 0,37. Hal ini dapat dipahami mengingat ragam pekerjaan di sektor Jasa sangat banyak, mulai dari tukang jahit, tukang pijat yang hanya bermodalkan keterampilan, hingga jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan seperti klinik ataupun rumah sakit swasta yang memerlukan asupan modal besar. Namun di tahun 2021 Indeks Gini di sektor ini menduduki peringkat kedua setelah sektor perdagangan. Pergeseran ini diduga juga sebagai akibat



dari pandemi Covid-19. Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling terpuak pada masa pandemi. Di tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi (pertumbuhan -9,2 persen) tertinggi setelah jasa lainnya (pertumbuhan -14,5 persen). Walaupun masih di bawah sektor jasa lainnya namun kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kota Mojokerto sangat jauh dibandingkan dengan sektor jasa lainnya. Sektor perdagangan yang diwakili oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor saja memiliki kontribusi 29,42 persen dibandingkan dengan kontribusi lapangan usaha jasa lainnya yang hanya 3,25 persen.

Berbeda dengan pekerjaan di sektor pertanian yang cenderung seragam sehingga berdampak pula pada pendapatan antar pekerja yang cenderung lebih merata dari tahun ke tahun. Selain sektor perdagangan, Indeks Gini tahun 2021 di semua jenis lapangan usaha mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2020, kecuali sektor lainnya yang konstan pada angka 0,30.

Tabel 5.6. Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021

Lapangan Usaha	Indeks Gini		
	2019	2020	2021
Pertanian	0,26	0,30	0,26
Industri Pengolahan	0,33	0,33	0,32
Perdagangan	0,30	0,33	0,35
Jasa	0,35	0,37	0,33
Lainnya	0,29	0,30	0,30

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama pada kurun waktu 3 tahun, kelompok pekerja keluarga adalah kelompok dengan Indeks Gini paling kecil daripada status pekerjaan lainnya, yaitu hanya sebesar 0,26 pada tahun 2019, meningkat menjadi 0,28 pada tahun 2020, dan turun menjadi 0,27 di tahun 2021 (Tabel 5.7). Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja bebas juga merupakan kelompok pekerja dengan ketimpangan yang rendah yakni 0,27 pada tahun 2019, meningkat menjadi 0,29 pada tahun 2020, dan kembali turun menjadi 0,27 di tahun 2021. Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun



borongan. Para pekerja bebas biasanya tidak memiliki jaminan keamanan kerja, unit usaha tidak berbadan hukum, dan yang menjadi poin penting adalah pendapatan yang diterima tidak tetap. Selain itu umumnya pendapatan para pekerja bebas berada pada kisaran yang sama antar lapangan usaha, sehingga wajar jika tidak ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara mereka.

Tabel 5.7. Indeks Gini Kota Mojokerto Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019 – 2021

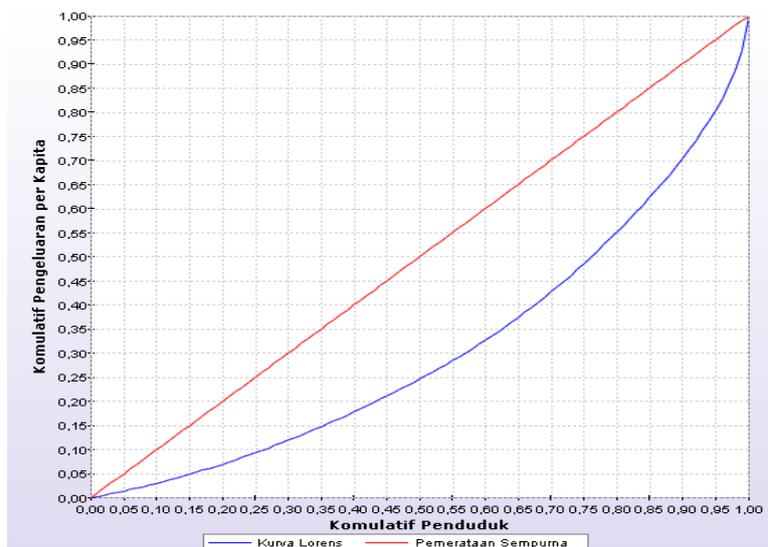
No	Status Pekerjaan Utama	Indeks Gini		
		2019	2020	2021
1	Berusaha Sendiri	0,28	0,34	0,34
2	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak dibayar/Pekerja Keluarga	0,27	0,31	0,29
3	Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar	0,34	0,39	0,28
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	0,30	0,36	0,33
5	Pekerja Bebas	0,27	0,29	0,27
6	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	0,26	0,28	0,27

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Kenaikan dan penurunan Indeks Gini menurut status pekerjaan utama pada kurun waktu 3 tahun terakhir memiliki pola yang berbeda. Jika dari tahun 2019 ke 2020 Indeks Gini semua kategori status pekerjaan utama mengalami kenaikan, maka dari tahun 2020 ke 2021 sebagian besar mengalami penurunan, hanya kategori berusaha sendiri yang nilainya tetap. Demikian juga dengan posisi peringkat tertingginya, jika di tahun 2019 dan 2020 kategori Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar dan Buruh/Karyawan/Pegawai menduduki peringkat 1 dan 2, maka di tahun 2020 yang menduduki peringkat 1 dan 2 adalah kategori Berusaha Sendiri dan Buruh/Karyawan/Pegawai. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang lebih berdampak pada kategori status Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar (dapat disebut sebagai pengusaha besar) yang mempunyai penurunan Indeks Gini tertinggi 0,11 poin, yang berarti pengeluaran para pengusaha besar cenderung menuju ke homogen.

5.4. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva yang terletak di dalam sebuah bujur sangkar di mana sumbu vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sumbu horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan.



Gambar 5. 15 Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2021

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Jika jarak kurva Lorenz jauh dari garis diagonal, artinya semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Berdasarkan Gambar 5.15 Kurva Lorenz Kota Mojokerto terletak cukup jauh dengan garis diagonal, dengan luas area sebesar 0,33. Maka dapat diartikan bahwa distribusi pemerataan pendapatan masyarakat Kota Mojokerto masih belum cukup baik (moderat).

5.5. Kriteria Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan Indeks Gini hanya mampu menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum cukup menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Oleh sebab itu, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat menggunakan kriteria Bank Dunia. Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi). Jika porsi pendapatan yang mereka terima berada di antara 12 persen sampai dengan 17



persen, maka dikatakan ber ketimpangan sedang/moderat dan jika lebih dari 17 persen dikatakan ber ketimpangan rendah. Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Tabel 5.8. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Mojokerto 2019-2021

Kelompok Pendapatan	2019	2020	2021
40% Pendapatan Terendah	21,11	18,86	19,22
40% Pendapatan Menengah	39,58	38,07	39,96
20% Pendapatan Tertinggi	39,31	43,07	40,82

Sumber: PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi topik yang perlu dibahas secara mendalam karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Makin timpang distribusi pendapatan secara tidak langsung mencerminkan semakin berbeda tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Perbedaan yang semakin besar dapat menimbulkan munculnya permasalahan sosial yang diakibatkan adanya ketidakseimbangan dan kecemburuan. Berdasarkan Tabel 5.8, pada tahun 2021 kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah di Kota Mojokerto hanya mendapat kontribusi pendapatan sekitar 19,22 persen. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya namun menurun jika dibanding tahun 2019.

Pada tahun 2020, distribusi pendapatan untuk kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah dan menengah mengalami penurunan yang disertai peningkatan untuk kelompok 20% Pendapatan Tertinggi, kondisi ini sesuai dengan meningkatnya Indeks Gini di tahun yang sama. Berbeda dengan tahun 2021 dimana kedua kelompok pendapatan tersebut mengalami peningkatan, hanya kelompok 20% pendapatan tertinggi yang mengalami penurunan, hal ini juga sesuai dengan angka Indeks Gini yang menurun di tahun 2021 dibandingkan dengan 2020. Sebagaimana analisis sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 lebih berdampak pada pola konsumsi kelompok penduduk berpendapatan tinggi (mapan) dan penduduk berpendidikan lebih tinggi, maka pandemi Covid-19 juga lebih berdampak pada penduduk kelompok 20% pendapatan tertinggi yang mengalami penurunan porsi pengeluaran cukup besar.



Pada kurun waktu 3 tahun, *share* paling kecil yang didapatkan oleh penduduk dalam kelompok pendapatan terendah dialami pada tahun 2020, yakni sebesar 18,86 persen dan yang tertinggi di tahun 2019 sebesar 21,11. Di tahun 2021 kelompok ini menikmati 19,22 persen pendapatan. Hal ini dapat dijadikan peringatan bahwa sesungguhnya kondisi masih rentan. Kelompok pendapatan terendah dapat masuk ke dalam kondisi ketimpangan menengah/sedang seandainya terjadi guncangan ekonomi. Hal lain yang juga patut dicermati adalah dominasi kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 20% berpenghasilan teratas. Masih dari tabel yang sama, terlihat bahwa persentase pendapatan kelompok tertinggi rata-rata sebesar lebih dari dua kali lipat pendapatan kelompok terendah. Dengan demikian, walaupun tergolong ketimpangan rendah (versi Bank Dunia), pada dasarnya porsi pendapatan yang diterima antar kelompok di Kota Mojokerto berbeda cukup signifikan, yang sekaligus kembali menegaskan hasil pembangunan belum dinikmati secara merata. Secara umum ketimpangan pendapatan di Kota Mojokerto tergolong rendah, karena persentase pendapatan kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah lebih dari 17 persen.

5.6. Program dan Strategi Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Mojokerto

Pandemi Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang biasanya menyentuh angka 5 persen pada tahun 2020 justru mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) sebesar 3,69 persen. Pada tahun 2021 ekonomi Kota Mojokerto kembali tumbuh sebesar 3,65 persen. Namun pertumbuhan ini belum cukup memperbaiki kondisi ekonomi yang biasanya tumbuh di atas 5 persen. Selain itu tumbuhnya ekonomi di tahun 2021 lebih dikarenakan kondisi ekonomi di tahun 2020 (pembanding) yang sangat terpuruk. Namun demikian menurunnya kondisi ekonomi ini justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Angka Indeks Gini di Kota Mojokerto tahun 2021 yaitu 0,33 yang berarti masih berada dalam kategori ketimpangan moderat. Berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Upaya untuk mengatasi ketimpangan seharusnya menggunakan pendekatan yang terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan. Berbeda dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, kebijakan pengurangan ketimpangan akan penuh kontroversi dan penolakan masyarakat khususnya kelompok kelas menengah atas. Oleh karena itu,



kebijakan penanggulangan ketimpangan harus lebih kreatif, inovatif, dan komprehensif sehingga akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Selain kebijakan-kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebijakan penanggulangan ketimpangan hendaknya juga menjadi prioritas. Agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai, perlu disusun strategi-strategi peningkatan perekonomian yang pro dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pertumbuhan yang dicapai juga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk.

5.6.1. Strategi

1. Mengoptimalkan harga-harga komoditas bahan makanan dan non makanan yang cukup stabil
2. Mengoptimalkan potensi daerah untuk dapat memiliki unggulan produk atau jasa yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah
3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, industri kreatif dan perdagangan
4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor dan kebangkitan berusaha
5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja
6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah

5.6.2. Arah Kebijakan

1. Menentukan target inflasi sebagai strategi dasar kebijakan
2. Memberikan fasilitas infrastruktur, finansial, manajerial dan pemasaran produk unggulan
3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan permodalan koperasi, UMKM, industri kreatif dan perdagangan
4. Memberikan kemudahan bagi investor dan wirausahawan melalui pemberian insentif dan disinsentif
5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja
6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata

5.6.3. Program

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi/BUMKel
2. Program penumbuhan industri (kreatif) kecil dan menengah



3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
4. Program bantuan bagi usahawan yang mampu menyerap tenaga kerja
5. Program peningkatan kesempatan kerja
6. Program peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata
7. Program peningkatan produk/jasa unggulan kelurahan
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan kelompok masyarakat kelurahan.



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan pada pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait kondisi Indeks Gini Kota Mojokerto yakni sebagai berikut:

1. Indeks Gini Kota Mojokerto pada tahun 2021 berada di angka 0,33 yang berarti Kota Mojokerto memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Demikian pula Indeks Gini untuk setiap kecamatan di Kota Mojokerto yang berada di antara 0,32 sampai 0,35, dimana Kecamatan Kranggan merupakan kecamatan dengan Indeks Gini tertinggi selama 3 tahun terakhir. Angka-angka tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa Kota Mojokerto harus lebih berhati-hati dan mengantisipasi agar Indeks Gini di tahun mendatang tidak kembali mengalami kenaikan. Namun demikian kondisi ketimpangan di Kota Mojokerto selama tahun 2016 – 2021 selalu berada di bawah angka provinsi dan nasional.
2. Berbagai ukuran seperti pola pengeluaran, Indeks Gini ataupun ketimpangan relatif versi Bank Dunia, semuanya mengindikasikan bahwa kue ekonomi yang tercipta di Kota Mojokerto belum sepenuhnya diterima merata oleh penduduk. Menurunnya Indeks Gini Kota Mojokerto menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto cukup waspada terhadap peningkatan Indeks Gini. Mempertahankan perbaikan Indeks Gini perlu dilakukan agar angka kesenjangan relatif rendah dan tidak terjadi masalah-masalah sosial di antara golongan anggota masyarakat.
3. Ketimpangan di Kota Mojokerto yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Gini menurut pengeluaran terutama lebih disebabkan oleh ketimpangan pada pengeluaran bukan makanan. Nilai Indeks Gini menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi terjadi pada kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat dan terendah pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (khusus tahun 2021). Berdasarkan lapangan usaha ketimpangan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok penduduk dengan lapangan usaha utama perdagangan, sedangkan berdasarkan status pekerjaan utama ketimpangan tertinggi terjadi pada kategori berusaha sendiri.
4. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok penduduk berpendapatan rendah dan



menengah cenderung lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk makanan. Sebaliknya, kelompok penduduk berpendapatan tertinggi lebih banyak menghabiskan penghasilan untuk konsumsi non makanan.

5. Tingkat ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia di Kota Mojokerto termasuk dalam kriteria rendah, karena share kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah lebih dari 17 persen.
6. Kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak pada perekonomian dan tingkat ketimpangan pada masyarakat. Perekonomian yang sempat terpuruk sebagai akibat diterapkannya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi mulai bangkit kembali. Di sisi lain, menurunnya kondisi ekonomi ini justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 lebih dirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan tinggi (mapan), kelompok penduduk berpendidikan semakin tinggi, penduduk dengan pekerjaan di sektor perdagangan, dan kelompok pengusaha besar.

6.2. Rekomendasi

Mengacu temuan hasil analisis, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. Perlu dipertahankan, dievaluasi dan diefektifkan langkah/ program kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto di bidang perekonomian, yang berkontribusi pada terciptanya pertumbuhan ekonomi dengan *trade off* yang minimal pada masalah ketimpangan.
2. Pemerintah Kota Mojokerto perlu menjaga kestabilan harga-harga komoditas bahan makanan dan non makanan, sehingga diharapkan dapat menyebabkan perubahan tingkat pendapatan nominal masyarakat dapat sesuai dengan perubahan daya beli terhadap komoditas bahan makanan dan non makanan di Kota Mojokerto.
3. Perlu adanya perbaikan pemerataan distribusi pendapatan yang dapat dilakukan melalui adanya program pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengeluaran belanja makanan dan non makanan penduduk dapat lebih merata.
4. Perlu terus didorong munculnya pusat pertumbuhan yang berorientasi pada



karakteristik setempat. Dengan meningkatkan produktivitas sektor/ produk unggulan untuk masing-masing wilayah. Misalkan dengan membangun kawasan wisata yang pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar. Harapannya, ketimpangan wilayah yang nantinya bisa berimplikasi terhadap ketimpangan pendapatan bisa ditekan.

5. Mendorong iklim kemudahan investasi dan wirausaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian melalui penyediaan infrastruktur, pendampingan, bantuan finansial dan pembinaan bagi usahawan yang terdampak covid-19.
6. Mendorong peningkatan kapabilitas tenaga kerja agar lebih siap memasuki dunia kerja yang semakin dinamis.



DAFTAR PUSTAKA

- [BPS Kabupaten Mojokerto] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2022.
- [BPS Kabupaten Mojokerto] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2020. Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2020.
- [BPS Kabupaten Mojokerto] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha 2016-2021.
- [BPS Provinsi Jawa Timur] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2022. Jawa Timur dalam Angka 2022.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto. (2021, 31 Desember). Jumlah Penduduk. Diakses pada bulan Juni 2022 dari <https://satikomo.mojokertokota.go.id/dataset/data/jumlah-penduduk-kota>.
- Hindriks, M. G. (2006). *Intermediate Public Economics*. Massachusetts: The MIT Press.
- Putri, H.P. 2010. Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten Kendal (Studi Kasus : Dataran Rendah Dan Dataran Tinggi). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Slideshare.net. (2017, 28 Maret). Distribusi Pendapatan. Diakses pada bulan Mei 2022 dari https://www.slideshare.net/mishelei_loen/distribusi-pendapatan



LAMPIRAN

KUISIONER

BLOK I. IDENTITAS TEMPAT		
RINCIAN	KETERANGAN	
1.1	1. Kota	Mojokerto
	2. Kecamatan	
	3. Desa/Kelurahan	
	4. Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan
	5. Nama Jalan/Gang dan nomor (Tulis selengkapnya)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> RT : </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> RW : </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> NO : </div>
BLOK II. KETERANGAN RUMAH TANGGA		
2.1	Nama Kepala Rumah tangga	
2.2	Jumlah Anggota Rumah Tangga	0-4 tahun
		5-9 tahun
		>10 tahun
		Jumlah Anggota Rumah Tangga
2.3	Siapakah yang menentukan kebijakan dalam pengeluaran keuangan dalam rumah tangga
BLOK III. KETERANGAN RESPONDEN DAN KEPALA RUMAH TANGGA		
3.1	Hubungan Responden dengan Kepala Rumah Tangga	1.Kepala Rumah Tangga (KRT) 6.Orangtua/Mertua
		2.Suami/istri 7.Famili
		3.Anak 8.Lainnya...
		4.Menantu
		5.Cucu
3.2	Jenis Kelamin KRT	1.Laki-laki 2.Perempuan
3.3	Umur KRTtahun
3.4	Pendidikan terakhir KRT	1. Tidak Sekolah 5. Diploma
		2. SD /Sederajat 6. S1
		3. SLTP/Sederajat 7. S2/S3
		4. SLTA/Sederajat
3.5	Status Perkawinan KRT	1. Belum kawin 2. Kawin 3.Duda/Janda
3.6A	Status Pekerjaan Utama KRT	1. Berusaha Sendiri
		2. Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak dibayar/Pekerja Keluarga
		3. Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar
		4. Buruh/Karyawan/Pegawai
		5. Pekerja Bebas
		6. Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar
3.6B	Lapangan Pekerjaan KRT	1. pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
		2. pertambangan dan penggalian 6. perdagangan, hotel dan restoran
		3. industri pengolahan 7. pengangkutan dan komunikasi
		4. listrik, gas dan air bersih 8. keuangan, real estate dan jasa perusahaan
		5. konstruksi 9. jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)

**BLOK IV. CATATAN**

--

BLOK V. KETERANGAN RESPONDEN DAN SURVEYOR

RINCIAN		Responden	Surveyor
5.1	1. Nama		
	2. Tanggal		
	3. Tandatangani		
	4. No HP		

BLOK VI. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

A. PENGELUARAN UNTUK MAKANAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR (BERASAL DARI PEMBELIAN, PRODUKSI SENDIRI DAN PEMBERIAN)		JUMLAH (Rp)
(1)		(2)
1	Padi-padian a. Beras	
	b. Lainnya (Jagung, terigu, tepungberas, tepungjagung)	
2	Umbi-umbian (Ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu, dll)	
3	Ikan/Udang/cumi/kerang a. Segar/basah	
	b. Asin/di awetkan	
4	Daging (daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan hati, limpa, abon, dendeng dll)	
5	Telur dan susu a. Telur ayam/itik/puyuh	
	b. Susu murni, susu kental, susu bubuk dll	
6	Sayur-sayuran (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacangpanjang, buncis, bawang, cabe, tomat dll)	
7	Kacang-kacangan (kacangtanah/hijau/kedele/merah/tunggak/mete, tahu, tempe, oncom dll)	
8	Buah-buahan (Jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya dll)	
9	Minyak dan lemak (Minyak kelapa/goreng, kelapa, mentega, dll)	
10	Bahan Minuman (Gula Pasir, gula merah, the, kopi, coklat, sirup)	
11	Bumbu-bumbuan (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, saus, vitsin, dll)	
12	Bahan Makanan Lainnya a. Mie instan, mie basah, bihun, makanan/mie kering	
	b. Lainnya (kerupuk, emping, dll)	
13	Makanan dan Minuman jadi	



	a.Makanan Jadi (roti,biskuit,kue basah,bubur,gado-gado,bakso,nasi pecel dll)	
	b.Minuman nonAlkohol (soft drink ,es sirop,es campur,limun,air mineral dll)	
	c.Minuman mengandung alkohol (bir,anggur,minuman keras lainnya dll)	
14	Rokok dan Tembakau	
	a.Rokok (rokok kretek,rokok putih,cerutu dll)	
	b.Lainnya (sirih,pinang,tembakau dan lainnya)	
15	Jumlah Pengeluaran Makanan (rincian 1 sd. 14)	

BLOK VI. PENGELUARAN RUMAH TANGGA (LANJUTAN)			
B. PENGELUARAN BUKAN MAKANAN		Sebulan Terakhir	12 Bulan terakhir
(BERASAL DARI PEMBELIAN,PRODUKSI SENDIRI, DAN PEMBERIAN)		(Rp)	(Rp)
(1)		(2)	(3)
16	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga		
	a.Sewa,kontrak,perkiraan sewa rumah (milik sendiri,bebas sewa, dinas,dan lain-lain		
	b.Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan		
	c.Rekening listrik,air,gas,minak tanah, bahan bakar dll		
	d. Kendaraan bermotor (bensin,solar,minyak pelumas, perbaikan,dll)		
	e.Rekening telepon rumah,pulsa HP,benda pos dll		
17	Aneka barang dan jasa		
	a.Sabun mandi/cuci,kosmetik,perawatan rambut/muka,tissue dll		
	b.Biaya kesehatan (rumahsakit,puskesmas,dokter praktek,dukun,obat-obatan,periksa kehamilan,imunisasi,dll)		
	c.Biaya pendidikan (uang pendaftaran,SPP,BP3/gedung,daftar ulang, pramuka,kursus,alat tulis,dan lainnya)		
	d.Transportasi, pengangkutan dan akomodasi (darat,laut,udara,biaya tol,hotel,hiburan,bioskop dll)		
	e.Jasa lainnya (gaji sopir,pembantu Rumah Tangga,hotel dll)		
18	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala (pakaian jadi,bahan pakaian,sepatu, sandal,topi,jilbab dll)		
19	Barang tahan lama (alat Rumah Tangga,perkakas,alat dapur,alat hiburan,(elektronik),olahraga,perhiasa,kendaraan,payung, arloji,HP,pasang telpon,pasanglistrik,barang elektronik,dll)		
20	Pajak,Pungutan dan Asuransi		
	a.Pajak (PBB,pajak kendaraan)		
	b.Pungutan/retribusi		
	c.Asuransi kesehatan		
	d.Lainnya (Asuransi lainnya,tilang,PPh,dll)		
21	Keperluan pesta dan upacara/kenduri tidak termasuk makanan (Perkawinan,ulangtahun,khitanan,upacara keagamaan, haji,umroh,upacara adat, dll)		
22	Jumlah Pengeluaran bukan Makanan (Rincian 16 sd rincian 21)		
23	Rata-rata Pengeluaran Makanan sebulan		



	(Rincian 15 x 30/7)		
24	Rata-rata Pengeluaran bukan Makanan sebulan (Rincian 22 kolom 3/12)		
25	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga sebulan (Rincian 23 + rincian 24)		
26	Penghasilan terbesar Rumah Tangga: 1.Buruh/karyawan 2.Pengusaha. 3.Lainnya..... (pilih dari art dg penghasilan terbesar) Jumlah penghasilan Rumah Tangga		<input type="checkbox"/>

LAMPIRAN 2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto, 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4 tahun	4.685	4.193	8.878
5-9 tahun	5.051	5.064	10.115
10-14 tahun	5.131	4.949	10.080
15-19 tahun	5.220	5.056	10.276
20-24 tahun	5.129	4.912	10.041
25-29 tahun	5.119	5.212	10.331
30-34 tahun	4.966	5.105	10.071
35-39 tahun	5.791	5.245	11.036
40-44 tahun	4.890	5.189	10.079
45-49 tahun	5.013	4.875	9.888
50-54 tahun	4.440	5.139	9.579
55-59 tahun	3.721	3.705	7.426
60-64 tahun	2.903	3.441	6.344
65-69 tahun	1.848	1.871	3.719
70-74 tahun	1.100	1.500	2.600
75+ tahun	1.082	1.727	2.809
Jumlah	66.089	67.183	133.272

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, PDPM DKPU ITS, 2022 (Diolah)

**LAMPIRAN 3**

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Menurut Jenis Atap Rumah Terluas, 2019-2021

Jenis Atap	2019	2020	2021
Beton	1,64	0,54	1,05
Genteng (Keramik, Metal, Tanah Liat)	86,75	87,25	86,85
Asbes/ Seng	11,61	12,21	12,10
Bambu, Kayu, Sirap	0,00	0,00	0,00
Jerami/Ijuk/Daun-daunan, lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

LAMPIRAN 4

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Menurut Jenis Dinding Rumah Terluas, 2019-2021

Jenis Dinding	2019	2020	2021
Tembok	96,15	97,35	97,54
Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat	1,17	0,00	0,00
Kayu/Batang	0,87	0,99	0,89
Bambu/ Anyaman Bambu	1,8	1,66	1,57
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

LAMPIRAN 5

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas, 2019-2021

Jenis Lantai	2019	2020	2021
Bukan Tanah	99,47	99,15	99,12
Tanah	0,53	0,85	0,88
Total	100,00	100,00	100,00

**LAMPIRAN 6**

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Menurut Jenis Luas Lantai Rumah, 2019-2021

Luas Lantai (m ²)	2019	2020	2021
< 20	5,79	2,31	1,98
20 – 49	18,85	18,00	18,52
50 – 99	42,31	42,74	47,76
100 – 149	19,90	23,21	18,59
150+	13,15	13,74	13,14
Total	100,00	100,00	100,00

LAMPIRAN 7

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Pengeluaran dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2019 – 2021

	2019			2020			2021		
	40% terbawah	40% tengah	20% teratas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
Sendiri	88,85	93,03	96,89	91,75	91,84	96,4	87,04	95,29	96,95
*Lainnya	11,15	6,97	3,11	8,25	8,16	3,6	12,96	4,71	3,05
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

LAMPIRAN 8

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Dirinci Menurut Kelompok Pendapatan dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2019-2021

	2019			2020			2021		
	40% terbawah	40% tengah	20% teratas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
Tangki septik/ IPAL/ SPAL	98,11	98,81	96,42	95,05	96,81	97,92	98,74	98,9	98,1
*Lainnya	1,89	1,19	3,58	4,95	3,19	2,08	1,26	1,1	1,9
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





LAMPIRAN 9

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Menurut Sumber Air Minum, 2019-2021

Sumber Air Minum	2019	2020	2021
Air Kemasan Bermerk	47,47	48,44	52,20
Air Isi Ulang	30,00	32,14	27,01
Sumur Bor/ Pompa	19,15	17,32	17,14
Leding	2,18	1,99	3,28
Sumur Terlindung	0,57	0,10	0,37
Lainnya	0,01	0,01	0,00
Sumur Tak Terlindung	0,54	0,00	0,00
Mata Air Terlindung	0,08	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

LAMPIRAN 10

Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Menurut Sumber Air Mandi, 2019-2021

Sumber Air Mandi	2019	2020	2021
Sumur Bor/ Pompa	86,75	88,51	91,60
Leding	7,25	10,38	7,20
Sumur Terlindung	4,28	1,11	1,20
Air Kemasan Bermerk	0,14	0,00	0,00
Air Isi Ulang	1,09	0,00	0,00
Sumur Tak Terlindung	0,34	0,00	0,00
Air Permukaan	0,15	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

**LAMPIRAN 11**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Mojokerto (dalam juta rupiah), 2016-2021

Kategori PDRB Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24952,6	25355,7	25551,2	25158,6	27210,4	26554.3
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	451445,1	479254,5	506999,5	522363,8	503810,5	518811.7
Pengadaan Listrik dan Gas	3835,6	3996,8	4191,6	4453,3	4438,4	4551.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5561,1	5837,9	6085	6381,5	6661,5	7072.2
Konstruksi	455974,7	483704	511849,4	541446	507533,1	511896.5
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1250938	1327943	1410089	1492983	1355601	1444303
Transportasi dan Pergudangan	107657,2	115047,8	122207,6	131717,6	123242,6	130523.1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261940,5	281231,9	303425,8	327021,8	300346,2	304716.1
Informasi dan Komunikasi	604073,1	644050,1	685621,5	734246,5	792049	836423.5
Jasa Keuangan dan Asuransi	315463,6	325381,6	340463,9	355622,7	355686,8	357491.5
Real Estate	119383,6	123842,6	128755,6	133952,3	138337,6	138684.6
Jasa Perusahaan	31343,7	33001,9	34764,2	36631,3	33977,5	34273
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	192780,7	199252,2	208050,2	216931,6	211685,2	211252
Jasa Pendidikan	185641,2	192720,4	200803,1	213157,2	219292,2	219975
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50010,6	52714,5	55684,8	59021	63777,6	66289
Jasa Lainnya	160825,9	167110	174401	184587,1	157814	163671
Total PDRB	4221827	4460445	4718943	4985676	4801464	4976488.4

LAMPIRAN 12

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020-2021

Jenis Kelamin	Lapangan Pekerjaan Utama 2020			Lapangan Pekerjaan Utama 2021		
	Pertanian	Industri	Jasa	Pertanian	Industri	Jasa



Laki-laki	1761	13488	21625	1700	13379	21294
Perempuan	466	7151	20717	709	4690	22815
Total	2227	20639	42342	2409	18069	44109

LAMPIRAN 13

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, 2016-2021

Tahun Pengamatan	Rata-rata			Persentase		
	Makanan	Non Makanan	Total	Makanan	Non Makanan	Total
2016	487221	681559	1168780	41,69%	58,31%	100,00
2017	561386	710063	1271449	44,15%	55,85%	100,00
2018	559204	680824	1240028	45,10%	54,90%	100,00
2019	584247	724542	1308789	44,64%	55,36%	100,00
2020	612721	770511	1383232	44,30%	55,70%	100,00
2021	667979	838398	1506377	44.34%	55.66%	100,00

LAMPIRAN 14

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2019-2021

	2019			2020			2021		
	40% terbawah	40% menengah	20% teratas	40% terbawah	40% menengah	20% teratas	40% terbawah	40% menengah	20% teratas
Makanan	387344	646185	852198	384640	653283	986407	418183	732284	1037685
Non Makanan	304152	651589	1703547	267922	664938	1981986	305779	775053	2025509
Total	691496	1297774	2555745	652562	1318221	2968393	723962	1507337	3063194